



**RENSTRA UNIT KERJA
DITJEN BIMAS KRISTEN
TAHUN 2015-2019**

(RENSTRA HASIL REVIU)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaruh globalisasi yang berkembang begitu cepat, perubahan *trend* perdagangan bebas (terakhir dengan adanya kesepakatan ASEAN dan China), dan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean tahun 2016, meminta kita melakukan peningkatan kerjasama dengan negara-negara Asean dan berdampak juga pada persaingan kualitas pasar kerja. Akselerasi tuntutan masyarakat, iklim politik, kondisi ekonomi yang sukar diprediksi, akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pembangunan agama. Kondisi itu menuntut kearifan dan harus disikapi secara bijak oleh setiap penyelenggara Negara, dan harus memberikan pelayanan prima (*excellent service*), bersikap proaktif dan tidak reaktif, pelayanan yang lebih berkualitas (*better*), lebih cepat (*faster*), lebih mudah pelaksanaannya (*easier*), dan lebih murah biayanya (*cheaper*).

Pembangunan bidang Agama memiliki peran yang strategis dalam upaya mendukung terwujudnya masyarakat dan bangsa yang memiliki kesadaran tinggi terhadap realitas multikulturalisme dan memahami serta menghayati kemajemukan sosial sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap ke-Indonesiaannya.

Agama adalah landasan spiritual, moral dan etika dalam pembangunan nasional, karena itu agama harus dipahami dan diamalkan oleh setiap individu, keluarga, dan masyarakat. Dengan merujuk Pancasila dan UUD 1945 setidaknya ada 5 (lima) landasan, yaitu: (1) Pembumih nilai-nilai profetik agama; (2) Penghormatan atas HAM dan Kebebasan Beragama; (3) Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama; (4) Transformasi Sosial yang berkeadaban serta (5) Pembangunan karakter dan jatidiri bangsa.

Kelima landasan tersebut hendaknya bermuara kepada kerangka dasar implementasi yang meliputi: (1) kualitas pelayanan kehidupan beragama umat Kristen; (2) kualitas penghayatan, pemahaman, dan pengamalan ajaran agama Kristen; (3) kualitas kerukunan umat beragama; (3) kualitas pendidikan agama Kristen dan pendidikan keagamaan Kristen; (4) kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019 mengandung hal-hal yang harus dijadikan prioritas nasional oleh seluruh kementerian. Ada 11 prioritas nasional, yaitu: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan Kemiskinan; (5) Ketahanan Pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; (8) Energi; (9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; (10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Daerah Pasca Konflik; serta (11) Kebudayaan, Kreatifitas, dan Inovasi Teknologi.

Selanjutnya RPJMN tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga. Bagian pokok dari Rencana Strategis Kementerian Agama akan menjabarkan arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama, yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program.

Karena itu, peningkatan kualitas Bimbingan Masyarakat Kristen, Visi, Misi, Arah dan Strategi Kebijakan, Sasaran, Program dan Kegiatan dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan, dituangkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen. Disamping itu pula, penyusunan Renstra Ditjen Bimas Kristen 2015-2019 disusun dengan mempertimbangkan berbagai capaian program dan kegiatan pada tahun anggaran sebelumnya, kondisi umum, potensi dan permasalahan serta faktor-faktor kunci keberhasilan pembangunan Agama bidang Bimbingan Masyarakat Kristen.

B. Kondisi Umum

Pembangunan Bidang Agama dan Bidang Pendidikan Kristen dalam kurun waktu lima tahun terakhir dalam rangka mewujudkan pencapaian visi dan misi Ditjen Bimas Kristen yang mencakup 5 (lima) hal, yaitu: (1) Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama Kristen; (2) Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; (3) Peningkatan kualitas kerukunan intern dan ekstern umat beragama; (4) Peningkatan dan pemerataan akses dan mutu Pendidikan Agama, dan Pendidikan Keagamaan; (5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

1. Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama Kristen

Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama Kristen dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain kegiatan peningkatan kualitas penyuluh agama Kristen, event keagamaan dan pemahaman nilai-nilai keagamaan.

a. Penyuluh Agama Kristen

Menurut Keputusan Menteri Agama RI Nomor 164 Tahun 1996, penyuluh agama adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka Penyuluh Agama Kristen adalah pembimbing umat Kristen dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Sesuai dengan keputusan Menteri agama tersebut, Penyuluh Agama memiliki peranan yang sangat strategis untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara Republik Indonesia ini yaitu mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut menjaga dan memelihara melakukan ketertiban dunia.

Dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara, program Nawacita dan misi Ditjen Bimas Kristen peran Penyuluh sangat strategis dan potensial. Penyuluh Agama Kristen merupakan garda terdepan dan potensial dalam upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama Kristen.

Secara khusus, Penyuluh Agama Kristen non PNS sebagai mitra kerja Penyuluh Agama PNS dalam rangka memberikan bimbingan, pendampingan dan penyuluhan kepada umat baik perorangan dan kelompok masyarakat sehingga pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama kepada umat Kristen semakin meningkat kualitasnya.

Mengingat peran penyuluh agama yang begitu strategis dan potensial, maka pemerintah dalam hal ini Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama berupaya untuk meningkatkan kinerja Penyuluh non PNS dengan melakukan berbagai kegiatan orientasi/bimtek, sosialisasi dan konsultasi serta memberikan bantuan tunjangan kinerja bagi Penyuluh non PNS.

Pengangkatan tenaga Penyuluh Agama menjadi prioritas penting dengan harapan dapat mendekati rasio ideal. Untuk memenuhi kekurangan tenaga Penyuluh PNS, Ditjen Bimas Kristen berupaya untuk menambah tenaga Penyuluh non PNS pada setiap tahun anggaran sesuai dengan ketersediaan anggaran.

b. Event Keagamaan

Kegiatan festival keagamaan yang diselenggarakan setiap tahun dan tiga tahun sekali, yang meliputi berbagai lomba yaitu paduan suara, solo, vokal group, musik pop gerejawi dan musik etnik. Disamping kegiatan tersebut juga diadakan pertemuan konsultasi, seminar, dan workshop dalam rangka memupuk persaudaraan dan kebersamaan serta mendorong aktivitas umat Kristen dalam mengembangkan pembinaan rohani melalui seni dan budaya bernafaskan Kristen, meningkatkan kerukunan umat beragama, meningkatkan kualitas dan kreativitas para musisi dalam menciptakan lagu-lagu pujian bagi Tuhan.

PESPARAWI (Pesta Paduan Suara Gerejawi) adalah salah satu bentuk kegiatan kerohanian yang sekaligus memperhatikan, menghargai dan mendorong pengembangan seni budaya yang bernafaskan keagamaan Kristen. Pesparawi adalah juga pesta iman, oleh sebab itu Pesparawi merupakan bentuk ibadah syukur dan puji-pujian kepada Allah yang telah menyatakan diriNya di dalam Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja. Namun, keunikan penyelenggaraan Pesparawi adalah kepanitiaannya didukung oleh umat agama-agama, sehingga melalui kegiatan Pesparawi kerukunan internal dan kerukunan bersama agama-agama terjalin dengan harmonis. Melalui kegiatan Pesparawi dapat diwujudkan Misi Kementerian Agama yaitu Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama.

Pesparawi Nasional adalah ajang perlombaan lagu-lagu gerejawi yang selalu mengalami perkembangan dari tahun ke tahun baik dalam pelaksanaan maupun kategori-kategori yang diperlombakan. Pesparawi juga merupakan wadah yang menyelenggarakan Paduan Suara Gerejawi baik pada tingkat Regional (Provinsi) maupun Nasional dalam rangka memotivasi umat Kristiani (Gereja) untuk menggali dan mengembangkan bakat-bakat/talenta yang dimiliki oleh setiap umat khususnya di bidang musik dan vokal untuk dipersembahkan sebagai pujian dan juga sebagai sebuah ekspresi penghayatan iman kepada Tuhan.

Pada setiap penyelenggaraan Pesparawi Nasional yang pelaksanaannya dengan kegiatan sayembara lomba cipta lagu dan/atau diadakan penugasan secara khusus kepada komposer untuk menciptakan lagu yang akan diperlombakan pada Pesparawi Nasional untuk dipilih dan diperlombakan menjadi lagu wajib dan lagu pilihan pada setiap pelaksanaan Pesparawi.

Pesparawi Nasional XI Tahun 2015 dilaksanakan di kota Ambon Provinsi Maluku. Provinsi Maluku terpilih menjadi tuan rumah adalah hasil Munas Pesparawi sebelumnya yaitu Pesparawi Nasional X Tahun 2012 di Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pesparawi Nasional XI Tahun 2015 Ambon mengambil tema “Sungguh Alangkah Baik dan Indahya Hidup dalam Persaudaraan yang Rukun” yang diselenggarakan pada tanggal 2 s.d 12 Oktober 2015. Ketua Umum Panitia Pesparawi Nasional XI tahun 2015 Ambon adalah Dr. Zeth Sahuburua yang juga sebagai Wakil Gubernur Provinsi Maluku dan Poli Kastanya sebagai Ketua Pelaksana Harian sekaligus Ketua LPPD Provinsi Maluku.

Pesparawi Nasional XI tahun 2015 Ambon diikuti oleh 34 Kontingen yang mewakili LPPD-LPPD setiap Provinsi di seluruh Indonesia. Dalam Pesparawi Nasional XI Ambon, Provinsi Maluku, Lomba Banding Lagu dibagi dalam 12 (dua belas) Kategori, yaitu: Solo Remaja/Pemuda Putera, Solo Remaja/Pemuda Puteri, Paduan Suara Anak, Solo Anak 7-9 Tahun, Solo Anak 10-13 Tahun, Paduan Suara Remaja/Pemuda (PSRP), Paduan Suara Wanita (PSW), Paduan Suara Pria (PSP), Paduan Suara Dewasa Campuran (PSDC), Vocal Group (VG), Musik Pop Gerejawi (MPG) dan Musik Etnik.

Pesparawi Ke XII sesuai hasil musyawarah ditetapkan di Ambon atas permintaan Gubernur provinsi Kalimantan Barat akan dilaksanakan pada tahun 2018 di kota Pontianak provinsi Kalimantan Barat.



Pembukaan Pesparawi XI di Ambon dihadiri oleh Presiden Joko Widodo

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama

a. Pemberian Bantuan Pengadaan Sarana Ibadah

Upaya meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama dilakukan melalui pengadaan sarana ibadah, antara lain: Alkitab, Kidung Jemaat, alat musik, LCD Proyektor, laptop/komputer kepada umat dan lembaga yang membutuhkan.

Ditjen Bimas Kristen periode sebelumnya telah mengadakan kitab suci/buku keagamaan umat Kristen sebanyak 216.343 eksemplar. Selanjutnya buku-buku tersebut telah distribusikan kepada umat beragama.

b. Penguatan Lembaga Keagamaan Kristen

Pemerintah mendorong penguatan lembaga keagamaan Kristen melalui pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan rumah ibadat/gereja. Penguatan lembaga keagamaan Kristen diarahkan pada peningkatan fungsi rumah ibadat sebagai pusat pembinaan umat untuk peningkatan: iman, pemahaman dan penghayatan serta pengamalan ajaran agama sesuai keyakinan masing-masing.

Membangun, merenovasi, dan memelihara rumah ibadat adalah kebutuhan yang mendesak seiring pertambahan jumlah umat yang beragama Kristen. Hal ini tercermin dari meningkatnya permohonan bantuan pembangunan/rehab/operasional rumah ibadat yang dikirimkan masyarakat kepada Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama.

c. Pengelolaan dan Pendayagunaan Dana Kolekte Umat Kristen

Gereja (umat Kristiani) sebagai bagian dari masyarakat Indonesia turut berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bidang agama dengan memanfaatkan persembahan syukur umat atau yang disebut sebagai dana kolekte untuk pelayanan umat. Dana kolekte atau persembahan yang dihimpun dari umat Kristiani pada saat ibadah (kebaktian) dikelola oleh gereja masing-masing yang dimanfaatkan antara lain untuk operasional gereja (ATK, telepon, listrik, transport, dll.), pembangunan gedung gereja (tempat ibadah), pengadaan sarana dan sarana peribadatan (pengadaan alkitab, nyanyian rohani, alat musik).

Gereja juga berperan dalam pelayanan sosial (diakonia) karena pelayanan sosial adalah satu di antara tugas panggilan gereja yang bukan hanya saja membantu fakir miskin, orang jompo, yatim piatu, penanggulangan bencana alam, pendidikan dan kesehatan, narkoba, tetapi lebih dari pada itu adalah untuk menyadarkan masyarakat mengenai hakekat dirinya sehingga mereka memiliki rasa percaya diri; memberdayakan masyarakat dengan mengorganisasikan mereka sehingga mereka dapat menghadapi serta melawan masalah yang mereka hadapi melalui kemampuannya. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan agar mereka dapat menghasilkan barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Kolekte tersebut di atas dikelola oleh gereja secara mandiri dan swadaya dengan akuntabel dan transparan melalui warta jemaat (penyampaian informasi kepada umat) saat pelaksanaan ibadah yang dibuat secara tertulis dan disampaikan berkala (minggu, bulan dan tahun).

d. Pemberdayaan Lembaga Sosial Keagamaan Kristen

Ditjen Bimas Kristen menjalin kemitraan dengan lembaga keagamaan, baik tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten/Kota yaitu gereja, yayasan, asosiasi perkumpulan, persekutuan atau nama lain dalam penanggulangan problematika umat. Kemitraan yang dikembangkan mencakup konsultasi, orientasi, koordinasi, sosialisasi dan pemberian bantuan. Beberapa kegiatan konsultasi, orientasi dan koordinasi antara lain : konsultasi dengan pimpinan lembaga keagamaan dan tokoh agama tentang peraturan perundang-undangan di bidang agama, administrasi, manajemen dan organisasi lembaga keagamaan, kasus sara, radikalisme, revolusi mental, kemiskinan, kerusakan lingkungan, kesenjangan sosial, pengangguran, kesehatan, narkoba, perilaku konsumtif, pendidikan, pelanggaran hak cipta, HIV/AIDS, *human trafficking*, pengarusutamaan gender, pornografi dan pornoaksi.

3. Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Konflik umat beragama masih sering terjadi akhir-akhir ini di beberapa daerah, PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tersebut masih ditengarai ada yang belum memahami makna maupun dalam implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Disamping sosialisasi dan implementasi pelaksanaan PBM tersebut perlu kajian secara mendalam dari berbagai pihak terkait untuk mewujudkan kerukunan umat beragama yang diharapkan semua pihak. Dialog kerukunan umat beragama dan pembinaan kepada umat perlu dilakukan dan terus dibina.

4. Peningkatan Kualitas dan Akses Pendidikan Agama Kristen dan Pendidikan Keagamaan Kristen

a. Peningkatan Akses Sekolah (Teologi/Agama Kristen)

Salah satu upaya meningkatkan akses pendidikan adalah dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperanserta melaksanakan pendidikan melalui pendirian sekolah Teologi/Agama Kristen swasta. Ditjen Bimas Kristen memfasilitasi permohonan sekolah keagamaan yang meminta untuk dinegerikan namun karena selektifnya dan persyaratan yang tidak mudah maka sampai tahun 2016 belum satupun sekolah keagamaan Kristen tingkat dasar dan menengah yang berhasil dinegerikan.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan pada jenjang dasar dan menengah secara kualitatif dan kuantitatif telah mendorong kemajuan lembaga pendidikan ini. Pertumbuhan jumlah lembaga pendidikan keagamaan jenjang dasar dan menengah cukup signifikan, khususnya di daerah–daerah yang sulit terjangkau seperti di berbagai kecamatan, kabupaten/distrik Prov Papua/Papua Barat/NTT/Sulawesi, sehingga pendidikan tersebut dalam melayani kebutuhan masyarakat Kristen.

b. Peningkatan Mutu Sekolah (Teologi/Agama Kristen)

Kerjasama penyelenggaraan Ujian nasional bersama Kemendikbud dan BSNP dimulai tahun lalu, sehingga penyelenggaran ujian nasional SMTK masuk dalam sisten Evaluasi Pendidikan nasional. Hasil Ujian Nasional (UN) menjadi salah satu tolok ukur mutu, dan digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk: (1) pemetaan mutu satuan dan/atau program pendidikan, (2) dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, (3) penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan, dan (4) pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan (Permendiknas No. 77/2008).

Ditjen Bimas Kristen secara konsisten berusaha meningkatkan kualitas dan akses pendidikan di sekolah teologi/agama Kristen meliputi seluruh jenjang. Salah satu yang sedang ditempuh adalah berkoordinasi pada instansi terkait agar guru pada pendidikan keagamaan juga dapat mengikuti program sertifikasi guru. Usaha lainnya adalah bantuan tidak langsung untuk sekolah (BOS), bantuan bagi ruang kelas baru, bantuan penyelenggaraan Ujian nasional, bantuan sarana prasarana pendidikan, bantuan penyelenggaraan akreditasi, semua itu untuk menjamin tersedianya pendidikan yang bermutu serta peserta didik dapat belajar dengan nyaman dan layak.

Pendidikan Agama Kristen tingkat dasar, dilaksanakan pada jalur: 1) Pendidikan keagamaan Kristen, meliputi: a) Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK), padatahun 2014 terdapat 15 buah; dan b) Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), pada tahun 2014 terdapat 28 buah. 2) Pendidikan Umum berciri khas Kristen Tingkat Dasar, meliputi: a) Sekolah Dasar Agama Kristen (SDAK); dan b) Sekolah Menengah Pertama Agama Kristen (SMPAK), pada tahun 2015 baru dimulai perancangannya. Pendidikan Agama Kristen tingkat menengah, dilaksanakan pada jalur: 1) Pendidikan keagamaan Kristen, adalah Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), pada tahun 2014 terdapat 138 buah; 2) Pendidikan Umum berciri khas Kristen Tingkat Menengah, adalah Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK). Kehadiran SDTK/SDAK, SMPTK/ SMPAK, SMTK/SMAK di Indonesia adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya gereja sebagai pendukung dan/atau lembaga/yayasan keagamaan yang tersebar diseluruh Indonesia dan didominasi daerah-daerah pedalaman. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan memberi kesempatan bagi lahirnya pendidikan keagamaan Kristendan Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen, yaitu SDTK, SMPTK, dan SMTK, dan pendidikan umum berciri khas Kristen SDAK, SMPAK, SMAK.

Kebijakan peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen dilakukan melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan keagamaan Kristen dan perintisan pendidikan berbasis keagamaan Kristen, khususnya pembinaan pendidikan agama Kristen pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Keberadaan pendidikan keagamaan Kristen, dan pendidikan umum berciri khas Kristen merupakan pendidikan formal yang dilaksanakan oleh masyarakat. Dalam pengembangan pendidikan keagamaan Kristen dan pendidikan umum bercirikhas Kristen diupayakan dilakukan pembinaan melalui penegerian pendidikan Kristen tingkat dasar dan menengah, baik pada jalur pendidikan keagamaan Kristen, maupun pada jalur pendidikan umum berciri khas Kristen (Mata pelajaran di SDTK meliputi: Ilmu Pengetahuan

Alkitab, Sejarah Gereja/Sejarah Suci, Etika Kristen, Dogmatika, Pendidikan Agama Kristen. Sedangkan Mata Pelajaran SMPTK mata pelajaran meliputi: Pendidikan Agama Kristen, Dogmatika, Etika, Ilmu Pengetahuan, Sejarah Gereja, dan Bahasa Inggris.

Penegerian satuan pendidikan Kristen diperlukan sebagai acuan bagi pengembangan pendidikan keagamaan Kristen dan pendidikan umum berciri khas Kristen. Rencana SDTK dan SMPTK yang akan dinegerikan sebanyak 8 sekolah yakni 4 (empat) SDTK yang terdiri dari: a. SDTK Jobel Batam, b. SDTK Setia Pontianak, c. SDTK Yonath Itaar, d. SDTK Pniel NTT dan 4 (empat) SMTK yaitu: a. SMPTK Tarus Kupang, b. SMPTK Parama Budi, c. SMPTK Abalbalat Barus, d. SMPTK Diaspora Sorong. Dalam peningkatan kualitas satuan pendidikan Kristen perlu pengembangan berbagai regulasi yang dibutuhkan, pengembangan kualitas materi pendidikan, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan Kristen. Bersamaan dengan peningkatan kualitas dan reformasi pendidikan, sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya pendidikan keagamaan Kristen, dan pendidikan umum berciri khas Kristen tingkat dasar dan menengah yang memenuhi minimal standar nasional pendidikan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Kristen.



FOTO SISWA DAN SISWI SMTK PADA SAAT UJIAN NASIONAL

c. Pendidikan Agama Kristen

Kebijakan Nasional mengenai pendidikan agama diarahkan pada peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan menuju tercapainya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan kemandirian bangsa yang kuat. Kebijakan ini dilakukan melalui sembilan fokus prioritas, salah satunya adalah program peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, yang ditempuh melalui peningkatan jumlah dan kapasitas guru, kapasitas penyelenggara pendidikan, pemberian bantuan dan fasilitasi, serta pengembangan kurikulum dan metodologi pembelajaran pendidikan agama dan keagamaan yang efektif sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Kebijakan Ditjen Bimas Kristen tahun 2015-2019 diarahkan pada peningkatan kualitas. Adapun target yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah: 1) tersedianya layanan PAK pada sekolah; 2) meningkatnya mutu layanan PAK pada sekolah; dan 3) meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama peserta didik. Strategi pencapaian yang digunakan antara lain melalui penyediaan dan pengembangan sarana prasarana PAK pada sekolah, termasuk di daerah bencana, terpencil dan tertinggal; pembentukan dan peningkatan kapasitas Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PAK, dan pemberdayaan Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Pendidikan Agama Kristen; peningkatan mutu kurikulum dan bahan ajar PAK; pengembangan standar model PAK pada sekolah; serta peningkatan partisipasi dan kemitraan sekolah, masyarakat dan pihak terkait lainnya.

Program lain terkait dengan Pendidikan Agama Kristen pada sekolah umum adalah peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik dan pengawas PAK. Adapun target yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah: 1) meningkatnya profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan agama Kristen; dan 2) meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan agama Kristen. Adapun strategi yang digunakan antara lain melalui peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan agama Kristen; penyediaan beasiswa dan bantuan pendidikan lainnya bagi guru; peningkatan wawasan guru melalui program pertukaran guru PAK; penyediaan subsidi tunjangan fungsional bagi guru PAK Non-PNS; penyediaan tunjangan profesi bagi guru PAK; dan tunjangan khusus bagi guru PAK di daerah terpencil.

Disamping hal tersebut, Ditjen Bimas Kristen juga terus melakukan upaya sosialisasi dan implementasi kurikulum PAK 2013. Terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang kemudian melahirkan Peraturan Pemerintah

Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, menjadi momentum yang sangat penting bagi posisi PAK. Menindaklanjuti momentum tersebut Kementerian Agama menerbitkan antara lain PMA Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah.

Di samping itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP, Ditjen Bimas Kristen juga memberikan layanan sertifikasi pada Guru PAK dan Pengawas PAK di sekolah. Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2007 hingga sekarang.

Sosialisasi Kurikulum 2013 tingkat dasar dan menengah telah diselenggarakan di empat lokasi yakni Makassar dan Medan untuk tingkat dasar, Bogor dan Surabaya untuk tingkat menengah, dan pada Tahun 2015 Sosialisasi Kurikulum 2013 akan dilaksanakan pada semua provinsi (34 provinsi).

Kemudian penyediaan sarana pendidikan tinggi Agama Kristen mutlak diperlukan guna memberikan pelayanan pendidikan tinggi yang lebih luas dan merata bagi masyarakat Kristen di tanah air. Hal ini sejalan dengan meningkatnya tata kelola pendidikan tinggi agama dalam mendorong pencapaian mutu dan ksespendidikan bagi masyarakat Kristen. Oleh karena itu, telah dilakukan pula langkah pendirian atau penergian Pendidikan Tinggi Agama Kristen yang kini berjumlah 7 Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN).

Untuk peningkatan kualifikasi Guru Pendidikan Agama Kristen (PAK), telah dilakukan pemberian bantuan peningkatan kualifikasi guru program S1. Bantuan peningkatan kualifikasi ini dilakukan karena sebagian guru PAK masih D1 dan D3. Selain itu, untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pembelajaran PAK di lingkungan Perguruan Tinggi Kristen, telah diupayakan program sertifikasi dosen PAK. Selain karena tuntutan Peraturan Perundangan sertifikasi Dosen PAK dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme Dosen PAK, sehingga memperoleh sertifikasi kelayakan mengajar sesuai dengan tuntutan mutu dosen.

d. Pendidikan Tinggi

Pembinaan pada pendidikan Tinggi Agama dan Keagamaan dilakukan mengacu kepada PP Nomor 55 Tahun 2007. Pembinaan untuk penyelenggaraan Pendidikan Agama sebagai mata kuliah pada Perguruan Tinggi Umum (PTU) dilakukan bersama dengan

Kemenristek Dikti, untuk Kurikulum dan pembelajarannya serta pembinaan pada dosen Agama Kristen pada PTU. Untuk pendidikan Tinggi Keagamaan swasta dan Negeri Ditjen Bimas Kristen bekerjasama dengan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta khususnya untuk penyelenggaraan Sertifikasi Dosen, Beban Kerja Dosen (BKD) serta Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD DIKTI). Kerjasama ini sudah dimulai sejak tahun 2010 dan terus berlanjut sampai sekarang. Hal ini disebabkan belum tersediannya secara cukup assesor sertifikasi dosen yang memiliki pangkat akademik Profesor serta masih dalam proses penyiapan perangkat lunak bagi aplikasi BKD dan PD DIKTI.

Jumlah perguruan Tinggi Swasta dan Negeri di Indonesia berjumlah 364 diantaranya ada 7 Perguruan Tinggi Agama Kristen Negeri Yaitu di Tarutung provinsi Sumatera Utara; Ambon provinsi Maluku; Sentani provinsi Papua, Toraja provinsi Sulawesi Selatan; Palangkaraya provinsi Kalimantan Tengah; Manado provinsi Sulawesi Utara dan Kupang provinsi NTT.

Ditjen Bimas Kristen Membina dan mendorong agar penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Agama Kristen bermutu, berdaya saing dan akuntabel melalui penilaian oleh BAN PT untuk Prodi maupun institusinya. Sertifikasi dosen sudah dimulai tahun 2010 dan sampai tahun 2016 telah tersertifikasi sejumlah 940 orang dosen.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, para dosen didorong untuk meningkatkan kualifikasi sehingga Dosen yang mengajar Strata Satu (S1) minimal berpendidikan Strata Dua (S2), begitu juga untuk jenjang Stratum Dua Dosen harus memiliki kualifikasi Doktor. Ditjen Bimas Kristen membantu peningkatan kualifikasi tersebut melalui bantuan beasiswa Dosen, meskipun kuotanya sangat kecil. Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Teologi/Agama Kristen saat ini berjumlah 7.055 orang.

Dalam rangka peningkatan dan pengembangan PTT/AK swasta di berbagai wilayah di Indonesia, diupayakan Penegerian Sekolah Tinggi Agama Swasta yang diharapkan menjadi pola/model penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di wilayahnya. Pada tahun 2014 Sekolah Tinggi Agama Kristen Arastamar Ngabang Kalimantan Barat telah diusulkan untuk mengikuti proses penegerian, diharapkan agar proses ini dapat segera terwujud menjadi Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN).

Kehadiran Perguruan Tinggi Teologi/Agama Kristen (PTT/AK) di Indonesia telah melewati sejarah yang cukup panjang dengan segala pengumpulan dan tantangan, demi menjawab kebutuhan, gereja-gereja, masyarakat Kristen serta membangun SDM bagi bangsa dan

negara, secara yuridis formal, kekuatan hukum adanya PTT/AK menjadi lebih jelas dengan adanya PP Nomor 55 Tahun 2007, tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. PTT/AK berfokus pada *customers* dan *stakeholders* kebutuhan terhadap lulusan PTT/AK senantiasa mengalami perkembangan yang pesat. Oleh karena itu, sistem Pendidikan yang digunakan oleh PTT/AK untuk menghasilkan jasa pendidikan, penulisan ilmiah, penelitian ilmiah dan jasa konsultasi senantiasa direkayasa untuk memenuhi tambahan kebutuhan *customers* dan *stakeholders*. Merujuk pada fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional sesuai UU Nomor 20 tahun 2003 yakni “berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab“, maka Pendidikan Tinggi Teologi/Agama Kristen bertujuan menghasilkan Warga Negara yang berkualitas antara lain: (1) Beriman Kristen dengan kualitas spiritual yang tinggi, (2) Berjiwa Pancasila dan berwawasan oikumenes, (3) Berkepribadian dewasa berdasarkan moral Kristiani, (4) Bersikap terbuka terhadap perubahan dan kemajuan ilmu, teknologi, dan seni, khususnya di bidang agama dan teologi, (5) Menguasai dasar dan prinsip keilmuan dan metodologi bidang teologi sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada dalam kawasan agama dan teologi, (6) Menguasai berbagai pengetahuan serta keterampilan menulis yang tercakup dalam bidang teologi serta ilmu-ilmu lainnya yang terkait agar mampu berpikir, bersikap dan bertindak sebagai ilmuwan yang berwawasan global dan Kristiani, (7) Menghargai berbagai ilmu dan keterampilan yang dapat menjadikannya sebagai “pelayan di gereja dan masyarakat” yang tangguh dan dapat diandalkan serta menjadi teladan dalam masyarakat.

Keberadaan Perguruan Tinggi Agama Kristen Negeri yang berada dalam pembinaan Kementerian Agama khususnya Ditjen Bimas Kristen terdapat tujuh Perguruan Tinggi Agama Kristen Negeri yang tersebar di Indonesia, yakni: IAKN Tarutung, IAKN Ambon, STAKPN Sentani, STAKN Palangkaraya, STAKN Toraja, IAKN Manado, dan STAKN Kupang .

Kebutuhan masyarakat Pendidikan Tinggi Keagamaan di berbagai daerah akan penyelenggaraan Perguruan Tinggi yang memenuhi standar nasional Perguruan Tinggi, maka proses penegerian di beberapa Provinsi sebagai model bagi Pendidikan Tinggi Keagamaan

swasta sangat dibutuhkan antara lain, Propinsi Kalimantan Barat, Papua Barat di Sorong, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur dan DKI Jakarta.

Program untuk Transformasi Perguruan Tinggi Agama Kristen Negeri dari Sekolah Tinggi menjadi Institut diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh STAKN yang mengacu kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan. Untuk peningkatan jenjang STAKN menjadi Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) diperlukan dukungan anggaran dan kebijakan dari Kementerian Agama serta peningkatan tenaga Pendidik dan kependidikan dari STAKN perlunya kualitas dan kuantitas dalam perubahan menjadi Institut Agama Kristen Negeri. Jumlah dosen yang berada dalam STAKN masih kurang dan perlu dilakukan penambahan kuantitas dan dosen dengan jenjang Doktor yang masih minim.



WISUDA STAKPN AMBON TAHUN 2016

5. Mewujudkan Tatakelola Kepemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Terpercaya

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya lembaga birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel. Sejumlah langkah yang ditempuh dalam upaya penguatan tatakelola pemerintahan di lingkungan Ditjen Bimas Kristen, yakni:

a. Tata Kelola Kepegawaian

Berkaitan dengan pengelolaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) diarahkan pada pembinaan aparatur yang profesional, netral, sejahtera, dan kredibel. Pada saat ini, Ditjen Bimas Kristen sedang menyiapkan manajemen kepegawaian yang baik dan meliputi penyusunan klasifikasi jabatan, standar kompetensi jabatan, dan SDM, serta analisis jabatan dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

b. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan

Tanggung jawab keuangan negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Salah satu upaya kongkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan secara umum sebagai bagian dari reformasi di bidang manajemen keuangan.

Mulai tahun 2015 Kementerian Agama RI termasuk Ditjen Bimas Kristen secara konsisten telah menerapkan standard dan sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (SAIBA), sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 15 tahun 2015 Tentang Penetapan Standar dan Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Kementerian Agama.

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dengan basis akrual maka informasi yang disajikan dalam laporan keuangan lebih komprehensif dibandingkan basis kas

menuju akrual. Selain itu laporan keuangan berbasis akrual juga dimaksudkan untuk memberikan manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan.

Capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian adalah cita-cita yang ingin kita capai, karena WTP merupakan predikat terbaik yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan kepada Kementerian/Lembaga, tetapi hal tersebut tidaklah mudah bagi Kementerian Agama yang mempunyai jumlah satuan kerja yang paling besar, untuk Ditjen Bimas Kristen saja berjumlah 331 satuan kerja. Oleh karenanya, untuk mencapai hal tersebut perlu komitmen bersama para pejabat atau fungsional penyusun laporan keuangan, untuk terus melakukan perbaikan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan mempelajari seluruh regulasi yang berhubungan dengan laporan keuangan dan mengadakan Bimbingan Teknis atau Konsultasi/Konsolidasi laporan keuangan pusat dan daerah, boleh juga dengan mengadakan bekerjasama dengan Pusdiklat Administrasi Kementerian Agama atau mengkonsultasikannya kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dalam mengembangkan pendidikan, pelatihan, dan materi tentang pengelolaan anggaran, mekanisme pembayaran, serta bagaimana menyusun laporan keuangan dengan baik sesuai dengan standar akuntansi yang baik.

Dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara, mulai akhir tahun 2004 Ditjen Bimas Kristen secara konsisten meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara. Kewenangan pengelolaan keuangan yang semula terpusat kemudian didistribusikan dengan membentuk Sistem Akuntansi Instansi dan SIMAK-BMN, serta mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit SPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan perangkat pembayaran lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dengan menumbuhkan proses *check and balances*.

Dari capaian Laporan Keuangan Ditjen Bimas Kristen dan unit eselon I lainnya tahun 2013 dan tahun 2014 berhasil mewujudkan Kementerian Agama telah memperoleh opini WTP DPP, dan telah berupaya meningkatkan opini LKKA menjadi WTP. Langkah-langkah yang ditempuh antara lain menyusun *Strategy* dan *Action Plan* Peningkatan Kualitas LKKA. Empat strategi peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Agama dilakukan melalui rekrutmen tenaga akuntansi, penataan aset dan penyelamatan BMN, serta menyusun

Laporan Keuangan beserta penyusunan *Sistem Operational Prosedur (SOP)*. Penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual dilaksanakan pada setiap jenjang pelaporan, yaitu dari UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1 dan UAPA.

c. Inventarisasi, Revaluasi dan Penyelamatan Aset

Sebagai pelaksanaan peningkatan kualitas Tugas dan Fungsi Bagian Umum maka perlu peningkatan kualitas dukungan pelayanan teknis dan Administrasi di bidang Ketatausahaan, Pengadaan Barang dan Jasa dan Kerumahtanggaan di Lingkungan Ditjen Bimas Kristen. Laporan Barang Milik Negara (BMN) yaitu Inventarisasi, Revaluasi dan Penyelamatan Aset, Kecepatan pelayanan administrasi ketatausahaan, persentase pelaksanaan pendistribusian surat yang tepat sasaran, akurasi pelaksanaan dan pelaporan BMN serta tingkat kepuasan pelayanan kerumah tanggaan merupakan suatu hal yang senantiasa ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bagian umum Ditjen Bimas Kristen. Ditjen Bimas Kristen dituntut harus dapat menyajikan laporan secara lengkap dan akuntabel, sehingga meningkatkan akuntabilitas pengelolaannya.

d. Penataan Organisasi

Penataan organisasi Kementerian Agama saat ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Agama. Struktur organisasi Ditjen Bimas Kristen pada tataran unit eselon di lingkungan Kementerian Agama tidak memiliki struktur organisasi di daerah. Secara struktural Organisasi di daerah dan UPT (Unit Pelaksana Teknis) berada di bawah kewenangan Sekretariat Jenderal, namun secara fungsional terdapat hubungan dan koordinasi kerja dengan Ditjen Bimas Kristen.

Penataan organisasi perlu dilakukan pengembangan dalam bentuk penambahan unit kerja baru di tingkat daerah, antara lain di provinsi Kalimantan Utara, provinsi Papua Barat dan provinsi NTT. Hal tersebut dilatarbelakangi tuntutan kebutuhan terhadap peningkatan kualitas pelayanan, yang disebabkan oleh kondisi geografis dan demografis, serta adanya perubahan struktur wilayah (pemekaran wilayah) baik di tingkat provinsi, Kabupaten/Kota, dan di tingkat Kecamatan.

e. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Ditjen Bimas Kristen telah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai sarana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam perkembangannya, pemanfaatan TIK mendorong terwujudnya *e-government* pada Ditjen Bimas Kristen, baik secara internal maupun pelayanan publik. *Website* Ditjen Bimas Kristen dibangun melalui sistem informasi berbasis *web service*, antara lain dengan menggunakan portal Kementerian Agama (www.kemenag.go.id) yang telah berjalan lebih dari 10 tahun. Sejak akhir Desember tahun 2015 Ditjen Bimas Kristen kembali menerbitkan majalah Pelita Kristen sebagai media komunikasi dengan Bimas Kristen daerah dan umat Kristen serta masyarakat Indonesia.

Sistem informasi yang telah terintegrasi yang sudah dibangun Ditjen Bimas Kristen antara lain Sistem Aplikasi *e-Data* dan Sistem *e-Monev* Bantuan. Di samping sistem aplikasi sistem tersebut, Ditjen Bimas Kristen memanfaatkan sistem Kementerian Agama yang sudah terintegrasi sebelumnya yaitu Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), Elektronik Monitoring Pelaksanaan Anggaran (*e-MPA*), Pemanfaatan surat elektronik (*email*) Kementerian Agama (mail.kemenag.go.id). Ditjen Bimas Kristen berupaya untuk membuat dan mengembangkan *e-Government* dalam kerangka mempermudah dan mempercepat pelayanan. Demikian juga *upgrade website* perlu terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan unit kerja.

f. Implementasi Reformasi Birokrasi

Sebagai wujud peningkatan kualitas kinerja pegawai dan pelayanan publik, Ditjen Bimas Kristen telah melakukan beberapa langkah reformasi birokrasi yang dimulai sejak tahun 2009. Dalam implementasinya, Ditjen Bimas Kristen telah menyusun pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk seluruh unit organisasi dan unit kerja. Di samping itu, pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan aturan mengenai tata kerja yang baru, yaitu PMA Nomor 42 tahun 2016, Ditjen Bimas Kristen telah melakukan analisis jabatan yang menghasilkan peta jabatan, uraian jabatan dan informasi beban kerja. Ketiga hal ini diperlukan untuk pembahasan atau validasi peringkat jabatan dan harga jabatan dengan Kementerian PAN-RB, dan BKN.

g. Peningkatan Kualitas Kebijakan

Peningkatan kualitas kebijakan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan keagamaan kepada masyarakat. Untuk itu, dilakukan identifikasi masalah kebijakan, pemetaan kebutuhan kebijakan, riset pengembangan kebijakan, dan penyusunan draft kebijakan.

Secara internal, peningkatan kualitas kebijakan dilakukan untuk optimalisasi pelayanan pegawai kepada masyarakat, penguatan komitmen pegawai dalam melaksanakan layanan, peningkatan mutu layanan, efisiensi dan efektifitas layanan, serta penguatan prinsip layanan yang akuntabel dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan serta penerapan zona integritas bagi Ditjen Bimas Kristen dan Wilayah Bersih Melayani .

Sementara secara eksternal, peningkatan kualitas kebijakan dilakukan dengan memperhatikan dinamika sosial keagamaan yang berkembang di masyarakat, seperti penanganan konflik bernuansa agama, peningkatan kualitas kerukunan internal dan eksternal,antisipasi munculnya gerakan radikal keagamaan, dan sosialisasi intensif tentang corak keagamaan yang ramah, inklusif, moderat, dan penuh rasa toleransi sebagai sebuah bangsa yang majemuk.

C. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

Keberhasilan suatu organisasi dapat ditentukan oleh kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi dan melakukan analisis lingkungan strategis. Analisis lingkungan strategis, mencakup perwujudan visi, misi, tujuan, sasaran dan program kerja meliputi: (a) kondisi internal yaitu kekuatan dan kelemahan (*Strenght and Weakness*); (b) kondisi eksternal yaitu peluang dan tantangan (*Oppurtunity and Threat*).

Pembangunan Agama yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama bagi umat Kristen, baik berupa peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama Kristen, kualitas Pendidikan Agama Kristen dan Pendidikan Keagamaan Kristen, maupun peningkatan kerukunan hidup umat Kristiani. Hal itu dimaksudkan sebagai perwujudan dari upaya peningkatan kesejahteraan umat Kristen yang mencakup bidang materil maupun spiritual, serta menciptakan harmonisasi kehidupan umat Kristen dengan umat beragama lainnya, sebagai upaya mewujudkan Negara Indonesia yang aman, damai dan sejahtera.

Dari aspek Kelembagaan basis pelayanan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen adalah Lembaga Keagamaan Kristen, antara lain: (1) Organisasi/Lembaga Gerejawi Aras Nasional; (2) Induk Organisasi Gereja/Sinode; (3) Perguruan Tinggi Teologi/Agama Kristen Negeri dan Swasta; (4) Sekolah Menengah Teologi Kristen; (5) Yayasan Pendidikan/Keagamaan Kristen; (6) Poliklinik/Rumah Sakit Kristen; (7) Panti Asuhan/Panti Jompo; (8) Asosiasi-Asosiasi Lembaga Pendidikan/Profesi; (9) Perkumpulan; (10) Asosiasi.

Dari aspek Sumber Daya Manusia (SDM) basis pelayanan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen terdiri dari: (1) umat Kristen; (2) Dosen Bidang Studi PTT/A Kristen Negeri dan Swasta; (3) Dosen PAK pada PTU Negeri dan Swasta; (4) Guru Agama Kristen tingkat SD-SLTA; (5) Guru Bidang studi SMTK; (6) Pengawas PAK tingkat Dasar dan Menengah; (7) Pendeta/Guru Injil/Guru Jemaat/Evangelis/Penatua; (8) Guru Sekolah Minggu; (9) Siswa dan Mahasiswa beragama Kristen; (10) Penyuluh Agama Kristen; (11) Pegawai Bimas Kristen pusat dan daerah serta pegawai STAKN.

Beberapa perkembangan penting dalam hal Bimbingan Masyarakat Kristen saat ini antara lain: (1) meningkatnya semangat keagamaan; (2) meningkatnya kualitas kehidupan beragama; (3) terbentuknya forum komunikasi/keesaan umat Kristen dan antar umat beragama untuk mendukung terwujudnya kerukunan intern dan antar umat beragama; (4) meningkatnya kualitas Pendidikan Agama Kristen dan Pendidikan Kegamaan Kristen; (5) meningkatnya kapasitas pranata keagamaan untuk memberikan pelayanan kehidupan umat Kristen yang lebih bermutu dan merata dan; (6) meningkatnya kualitas dan kapasitas operasional perbaikan manajemen penyelenggaraan Bimbingan Masyarakat Kristen dan manajemen penyelenggaraan Pendidikan Agama/Keagamaan Kristen.

Kondisi umum pelayanan Bimbingan Masyarakat Kristen bidang peningkatan kualitas kehidupan umat Kristen tercermin dalam pemahaman dan pengamalan ajaran agama Kristen oleh umat Kristen umat Kristen yang menunjukkan kecenderungan positif dan semangat keagamaan yang kuat, yang ditandai dengan makin tingginya tingkat aktivitas peribadatan; maraknya peringatan hari-hari besar keagamaan Kristen; tumbuh suburnya lembaga keagamaan yang bergerak pada ranah sosial, budaya ekonomi, hukum dan pendidikan; berkembangnya berbagai media penyiaran agama Kristen; meningkatnya akses masyarakat kepada berbagai sumber informasi keagamaan. Untuk itu upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen antara lain adalah pengadaan Kitab Suci; bantuan kegiatan keagamaan; peningkatan kualitas bimbingan dan konsultasi keagamaan, peringatan Paskah dan Natal; peningkatan pembinaan Penyuluh

Agama Kristen; peningkatan pemahaman peraturan perundang-undangan; bantuan buku-buku keagamaan; pengembangan sistem informasi keagamaan; meningkatkan pembinaan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera; serta bantuan rehabilitasi gedung Gereja. Di samping itu, dilaksanakan juga PESPARAWI Nasional, dan peningkatan mutu tata kelola pelayanan administrasi gereja. Usaha tersebut telah memberikan kontribusi bagi berkembangnya pola keberagaman yang inklusif, saling menghargai dan menghayati kemajemukan, serta meningkatnya gairah keagamaan bagi umat Kristen.

Dalam rangka peningkatan kualitas kerukunan beragama, bangsa Indonesia memiliki multietnik, multikultur, multi aliran keagamaan, kerukunan intern dan antar umat beragama menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu dilakukan langkah-langkah antara lain: reharmonisasi kehidupan sosial keagamaan daerah pasca konflik; optimalisasi antisipasi disharmonisasi sosial daerah rawan konflik; penguatan peran dan pemberdayaan nilai-nilai kearifan lokal; peningkatan pemahaman agama berwawasan multikultural; penguatan peran tokoh-tokoh agama dan pemuka agama Kristen; sosialisasi dan implementasi PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Berbagai usaha tersebut telah memberikan kontribusi penting bagi upaya rekonstruksi dan reharmonisasi kehidupan beragama di kalangan umat Kristen dan dengan umat beragama lain.

Dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan Agama Kristen dan Pendidikan Keagamaan Kristen, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen melakukan berbagai program yang diarahkan pada perluasan akses pendidikan; akselerasi peningkatan mutu; relevansi dan daya saing; serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik terhadap seluruh jalur, jenis dan jenjang pendidikan khususnya Pendidikan Keagamaan Kristen.

Dalam upaya perluasan akses pendidikan, Direktorat Jenderal Bimas Kristen memberikan bantuan operasional sekolah mulai dari jenjang SD sampai dengan Perguruan Tinggi Teologi/Agama Kristen. Sedang dalam upaya peningkatan mutu dan proses pendidikan telah diberikan bantuan rehabilitasi gedung sekolah mulai dari SDTK sampai dengan PTT/A Kristen.

Dalam upaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan telah diberikan beasiswa dan bantuan studi program S1, S2 dan S3, sertifikasi guru, tunjangan profesi guru, konsultasi pengawas PAK, pemberian bantuan KKG dan MGMP; implementasi KTSP; penyempurnaan kurikulum pendidikan SDTK sampai PTT/A Kristen; konsultasi dengan pimpinan Sekolah mulai dari SDTK sampai dengan Perguruan Tinggi Teologi/Agama Kristen; orientasi dan pelatihan guru PAK dari SDTK sampai dengan PTT/A Kristen; serta sosialisasi berbagai regulasi dalam pendidikan. Upaya tersebut telah memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan agama Kristen dan pendidikan keagamaan Kristen.

Dalam bidang penguatan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai upaya mewujudkan *good governance* dan *clean government*, Ditjen Bimas Kristen melakukan: (a) penataan organisasi di pusat dan di daerah dan pengembangan STAKN dengan menambah 1 STAKN ; (b) peningkatan kualitas SDM aparatur; (c) peningkatan pengelolaan keuangan dan barang milik Negara (BMN) melalui sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan sesuai dengan arah dan kebijakan reformasi bidang keuangan, pelatihan pengelola keuangan, pelatihan pengadaan barang dan jasa, penerapan sistem informasi manajemen akuntansi dan barang milik negara; (d) peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja, melalui pemberian sanksi, hukuman disiplin dan teguran kepada beberapa orang pegawai; dan (e) optimalisasi perencanaan program dan pengelolaan anggaran.

2. Permasalahan

Selain melakukan identifikasi kondisi internal perlu juga dilakukan identifikasi tentang permasalahan dan kendala yang masih dihadapi dalam pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen sebagai berikut:

Di bidang peningkatan kualitas kehidupan beragama umat Kristen masalah utama yang dihadapi antara lain: (a) Banyaknya Lembaga/Organisasi Pendidikan dan Keagamaan Kristen yang menjadi kekuatan, tetapi juga sering menimbulkan permasalahan yang hanya diawali dengan kesalahpahaman atau masalah kecil yang berkembang menjadi konflik antara sesama umat, antar lembaga keagamaan Kristen bahkan antar umat beragama lain; (b) Meningkatnya semangat keagamaan umat Kristen belum sepenuhnya tercermin dalam sikap dan perilaku sosial; (c) masih rendahnya tingkat pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Kristen; (d) masih terjadi kesenjangan antara kesalehan ritual dengan kesalehan sosial; (e) belum optimalnya pembinaan keluarga kecil bahagia dan sejahtera; (f) masih rendahnya pengelolaan sumber daya keagamaan Kristen; (g) pengelolaan dana sosial keagamaan belum optimal untuk kepentingan masyarakat Kristen; (h) ketersediaan sarana-prasarana yang belum memadai.

Di bidang peningkatan kerukunan umat beragama, masalah utama yang dihadapi antara lain: (a) masih menggejalanya ketidakserasian kehidupan sebagian masyarakat, baik dalam hubungan intern maupun hubungan antar umat beragama; (b) harmonisasi sosial dan kerukunan belum sepenuhnya terwujud di kalangan umat Kristen; (c) masih terdapat gejala atau kecenderungan eksklusifisme dalam beragama; (d) belum optimalnya penerapan sejumlah peraturan perundang-undangan bernuansa kerukunan; (e) belum memadainya pemberdayaan kearifan lokal sebagai sistem perekat sosial; (f) penerapan antisipasi dini dan penanganan konflik belum sepenuhnya berjalan seperti yang diharapkan; (g) Pelayanan dan fasilitas pelayanan umat Kristen belum optimal.

D. Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik sebagai upaya mewujudkan *good governance* dan *clean government*.
2. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Kristen sebagai upaya peningkatan kualitas iman.
3. Meningkatkan akses masyarakat kepada berbagai sumber informasi keagamaan.

4. Mewujudkan harmonisasi kehidupan beragama sebagai upaya peningkatan kualitas kerukunan internal dan eksternal umat beragama.
5. Perluasan akses pendidikan, akselerasi peningkatan mutu, relevansi dan daya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan Kristen.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ASN Bimas Kristen.
7. Penyempurnaan dan pengembangan kelembagaan dan struktur Bimas Kristen pusat dan daerah dalam upaya memberikan pelayanan kepada umat yang memadai.
8. Ketersediaan alokasi anggaran yang memadai pada program Bimas Kristen.

E. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Periode Sebelumnya

Program dan Kegiatan Bimas Kristen tahun anggaran 2010-2014 diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan bimbingan masyarakat Kristen sesuai dengan kebijakan Dirjen Bimas Kristen yang mengacu kepada kebijakan Menteri Agama.

Pada tahun anggaran 2010 Ditjen Bimas Kristen memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 104.422.444.000,-. Apabila dibandingkan dengan anggaran tahun 2009 sebesar Rp 103.026.299.000,-, maka anggaran tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.395.701.000,- atau sekitar 1.04 %. Dari anggaran yang semula Rp 104.422.444.000,- memasuki akhir tahun 2010 mengalami peningkatan dengan adanya penambahan APBN-P tahun 2010 sehingga menjadi Rp 124.292.444.000,- dengan besarnya prosentase peningkatan 1,19 %.

Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Ditjen Bimas Kristen sampai dengan Triwulan IV telah dilaksanakan dengan baik. Di triwulan IV ini (Januari s.d. Desember) Tahun 2010 anggaran yang tersedia dalam DIPA sebesar Rp 104.422.444.000,- mengalami peningkatan dengan adanya APBN-P tahun 2010 menjadi Rp 124.292.444.000,- dan anggaran yang dapat terserap sebesar Rp 119.381.278.389,- sehingga sisa anggaran yang masih ada sampai dengan akhir tahun 2010 sebesar Rp 4.911.165.611,- dengan besarnya prosentase serapan dana sebesar 96,05 %.

Untuk tahun anggaran 2011, secara keseluruhan realisasi pelaksanaan kegiatan Ditjen Bimas Kristen periode Januari-November 2011 telah terlaksana dengan lancar dan baik. Dari keseluruhan anggaran yang tersedia sebesar Rp 126.635.650.000,- telah terealisasi sebesar Rp 98.514.061.107,- dengan capaian prosentase sampai dengan November 2011 sebesar 77,79 %.

Pagu Anggaran Ditjen Bimas Kristen tahun 2012 memperoleh anggaran sebesar Rp 134.808.275.000,-, pada pertengahan bulan Maret terjadi revisi DIPA sehingga anggarannya bertambah menjadi Rp 136.808.275.000,-. Di pertengahan tahun, tepatnya pada bulan Agustus terdapat revisi anggaran dengan bertambahnya anggaran DIPA, menjadi Rp 140.523.481.000,-. Sedangkan anggaran untuk seluruh provinsi termasuk perguruan tinggi keagamaan Kristen Negeri sebesar Rp 821.945.787.000,-. Dengan demikian, seluruh anggaran pada Ditjen Bimas Kristen dan jajarannya tahun 2012 sebesar Rp 962.469.268.000,-.

Secara umum program dan kegiatan Ditjen Bimas Kristen tahun 2012 dapat dilaksanakan sesuai dengan target capaian yang telah ditetapkan. Adapun realisasi anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Ditjen Bimas Kristen Tahun 2012 sebesar Rp 885.255.058.551,- atau 91,98 % dari total anggaran sebesar Rp 962.469.268.000,-.

Secara umum program dan kegiatan Ditjen Bimas Kristen tahun 2013 dapat dilaksanakan sesuai dengan target capaian yang telah ditetapkan. Adapun realisasi anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Ditjen Bimas Kristen Tahun 2013 sebesar Rp 1.023.672.503.683,- atau 98,24 % dari total anggaran sebesar Rp 1.042.627.061.000,-.

Pada Program Bimbingan Masyarakat Kristen Tahun Anggaran 2014 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 1.192.210.223.000. Pagu anggaran sebesar Rp. 1.192.210.223.000,- digunakan untuk menyelenggarakan Fungsi Pendidikan yaitu sebesar Rp. 62.392.792.000,- atau 52,3% dari total pagu anggaran, Fungsi Agama yaitu sebesar Rp. 133.187.194.000,- atau 11,17 % dari total pagu anggaran dan Fungsi Pelayanan Umum yaitu sebesar Rp. 996.630.237.000,- atau 83,6 % dari total pagu anggaran.

Realisasi anggaran pada masing-masing fungsi telah dilaksanakan dengan sesuai rencana dan kondisi serta situasi pada tahun tersebut dapat berjalan dengan baik walaupun ada kendala dalam pelaksanaan program tersebut.

Penjelasan realisasi anggaran perfungsi dapat dilihat pada Tabel 1.

TABEL 1
REALISASI ANGGARAN PERFUNGSI TAHUN 2014

NO.	FUNGSI	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	%
1	Pelayanan Umum	62.392.792.000	56.573.064.642	90.67
2	Agama	133.187.194.000	112.838.084,073	97.32
3	Pendidikan	996.630.237.000	969.886.925.534	97.32
TOTAL		1.192.210.223.000	1.139.298.074.249	95.56

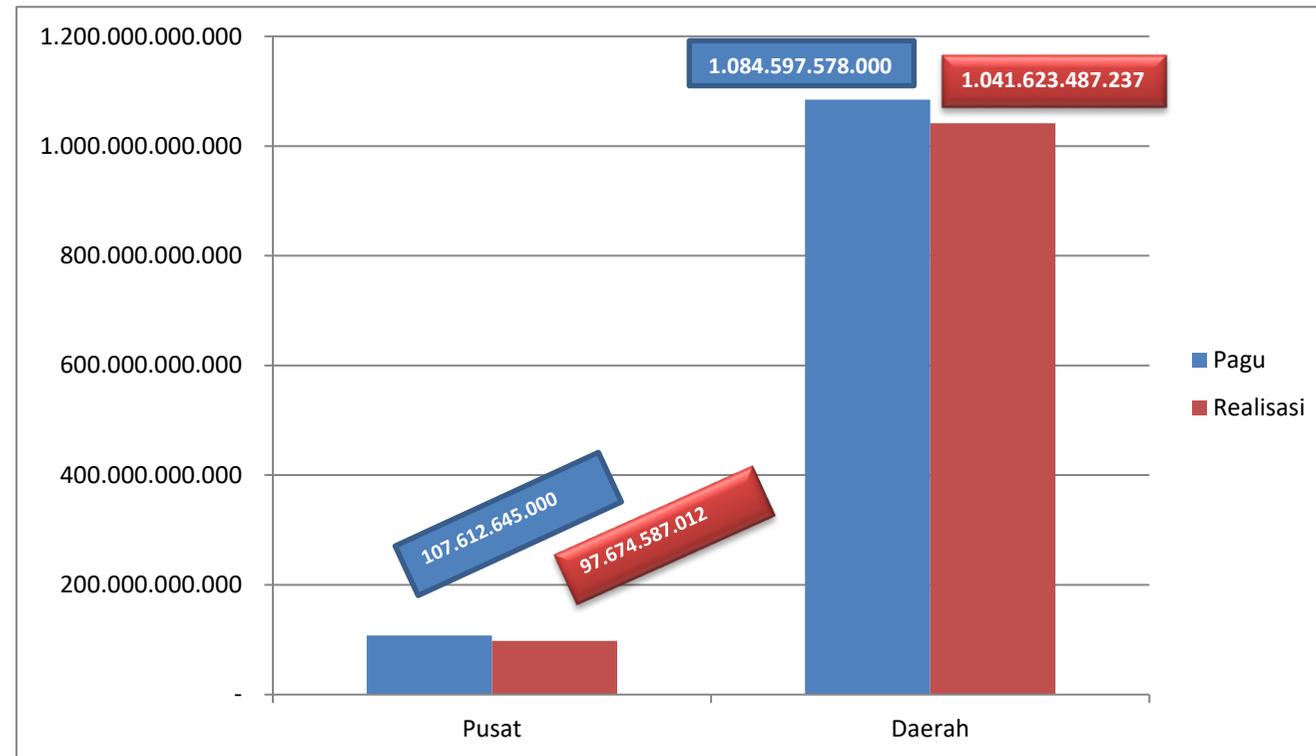
Capaian realisasi anggaran Pusat dari Januari s/d 31 Desember 2014 sebesar Rp. 97.674.587.0197.674.587.0122 atau sebesar 90,76 %. Sedangkan capaian realisasi anggaran Daerah s/d 31 Desember 2014 sesuai yang dilaporkan Satuan Kerja Daerah sebesar Rp. 1.041.623.487.237 atau sebesar 96,04 %.

Dengan demikian, capaian realisasi anggaran Pusat dan Daerah s/d 31 Desember 2014 sebesar Rp. 1.139.298.074.249 atau sebesar 95,56 % dapat dilihat pada Tabel 2.

TABEL 2
 REALISASI ANGGARAN PUSAT DAN DAERAH
 TAHUN 2014

NO.	SATUAN KERJA	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	%
1	Pusat	107.612.645.000	97.674.587.012	90.76
2	Daerah	1.084.597.578.000	1.041.623.487.237	96.04
TOTAL		1.192.210.223.000	1.139.298.074.249	95.56

GRAFIK REALISASI ANGGARAN TA.2014



TABEL 3

REALISASI ANGGARAN PRIORITAS NASIONAL 2014						
NO	JENIS KEGIATAN	SATUAN		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
		TARGET	REALISASI			
1	Jumlah guru yang menerima Tunjangan profesi Non PNS	977 Org	977 Org	17.586.000.000	17.586.000.000	100
2	Jumlah Kualifikasi Guru Program S1	1000 Org	1000 Org	6.000.000.000	6.000.000.000	100
3	Jumlah Sertifikasi Guru Agama Kristen	1000 Org	1000 Org	600.000.000	600.000.000	100
4	Jumlah Mahasiswa Miskin Penerima Beasiswa	1000 Org	1000 Org	1.500.000.000	1.500.000.000	100
5	Jumlah Guru Non PNS yang menerima tunjangan Fungsional	574 Org	574 Org	1.722.000.000	1.722.000.000	100
6	Bantuan Kinerja Pembimbing Ibadah Anak	1000 Org	831 Org	1.800.000.000	1.495.800.000	83,10
7	Bantuan Kinerja Pembimbing Ibadah Remaja	1000 Org	865 Org	1.800.000.000	1.557.000.000	86,50
8	Bantuan Kinerja Pembimbing Ibadah Lansia	1000 Org	940 Org	1.800.000.000	1.692.000.000	94
9	Jumlah Penyuluh Non PNS penerima bantuan	3493 Org	3493 Org	12.574.800.000	12.574.800.000	100

Program Bimas Kristen tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kondisi serta situasi pada tahun tersebut. Capaian target realisasi fisik secara keseluruhan rata-rata telah mencapai angka mendekati 100% (Tabel 3). Pelaksanaan program tersebut dapat berjalan dengan baik walaupun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya yang mengakibatkan pelaksanaannya agak tersendat. Namun kendala tersebut dapat diatasi dengan berbagai upaya dan strategi sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan baik.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 8), Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 168) serta berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 1495), maka Kementerian Agama RI merumuskan visi dan misi.

A. Visi, Misi dan Tujuan Kementerian Agama RI

Visi: “Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Misi:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama;
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas;
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel;
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan;
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

B. Visi, Misi dan Tujuan Ditjen Bimas Kristen

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 136 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273) dan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 pada Pasal 496 disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Kristen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 497, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Urusan Agama dan Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Urusan Agama dan Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen;
- c. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Urusan Agama dan Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Urusan Agama dan Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Urusan Agama dan Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Selaras dengan tugas dan fungsi Ditjen Bimas Kristen tersebut, maka Ditjen Bimas Kristen merumuskan visi, misi, tujuan dan strategis sebagai berikut.

Visi : “TERWUJUDNYA MASYARAKAT KRISTEN YANG BERIMAN, RUKUN, CERDAS DAN SEJAHTERA, DALAM RANGKA MENUJU INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

Misi:

1. MENINGKATKAN KUALITAS PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN AJARAN AGAMA KRISTEN;
2. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA;
3. MEMANTAPKAN KUALITAS KERUKUNAN INTERNAL DAN EKSTERN UMAT KRISTEN;
4. MENINGKATKAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN KEAGAMAAN BERCIRI KHAS KRISTEN, PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PADA SATUAN PENDIDIKAN UMUM;
5. MEWUJUDKAN TATA KELOLA DI LINGKUNGAN BIMAS KRISTEN YANG BERSIH, AKUNTABEL DAN TERPERCAYA.

C. Tujuan Dan Sasaran Strategis Ditjen Bimas Kristen

1. Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan perwujudan pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Dengan merumuskan tujuan, Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama dapat mengetahui apa yang harus dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan secara

akurat dan akuntabel. Perumusan tujuan yang ditetapkan akan memberikan arah misi dan visi Ditjen Bimas Kristen dan harus mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Tujuan strategis tahun 2015-2019 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan beragama;
2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan keagamaan;
3. Terwujudnya peningkatan kualitas kerukunan internal dan eksternal umat Kristen;
4. Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pendidikan keagamaan berciri khas Kristen, pendidikan agama Kristen pada satuan pendidikan umum;
5. Terwujudnya tata kelola di lingkungan Bimas Kristen yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

2. Sasaran Strategis

Untuk mencapai tujuan strategis pembangunan bidang agama 2015-2019, maka ditentukan sasaran strategis Ditjen Bimas Kristen sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, yang ditandai dengan meningkatnya nilai indeks Kesalehan Sosial;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan, yang ditandai dengan meningkatnya nilai indeks Layanan Keagamaan Kristen;
3. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel yang ditandai dengan status opini laporan keuangan, nilai reformasi birokrasi dan predikat akuntabilitas kinerja;
4. Meningkatnya akses layanan pendidikan yang ditandai dengan meningkatnya APK/APM pada sekolah dan pendidikan tinggi keagamaan Kristen, jumlah siswa penerima KIP, jumlah penerima BOS, jumlah penerima Bidikmisi, dan jumlah penerima beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA);
5. Meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan yang ditandai dengan rerata nilai ujian sekolah keagamaan, indeks integritas siswa, institusi PTK yang terakreditasi minimal B, prodi PTK yang terakreditasi minimal B, jumlah peserta kualifikasi Dosen non PNS, dan Dosen bersertifikat.

**Sasaran Strategis dan Target Kinerja
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen
Tahun 2015-2019**

No	Sasaran	Indikator Kinerja		TARGET-2015	TARGET-2016	TARGET-2017	TARGET-2018	TARGET-2019	Satuan
a	b	c		d	e	f	g	h	i
1	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Umat Beragama	-	Indeks Keshalihan Sosial	62	63	64	65	67	%
2	Meningkatnya Kualitas pelayanan Kegamaan	-	Indeks layanan keagamaan Kristen	65	67	68	70	72	%
3	Terselenggaranya tatakelola pemerintahan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel	1	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	NILAI
		2	Nilai Reformasi Birokrasi	72	73	75	80	82	POIN
		2	Predikat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	A	A	NILAI
4	Meningkatnya akses layanan pendidikan	1	APK SDTK	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	%
		2	APK SMPTK	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18	%

	3	APK SMTK	0,76	0,77	0,78	0,79	0,8	%		
	4	APM SDTK	0,07	0,08	0,09	0,10	0,10	%		
	5	APM SMPTK	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	%		
	6	APM SMTK	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	%		
	7	APK PTKK	0,13	0,14	0,15	0,16	0,17	%		
	8	Siswa SDTK/SMPTK/SMTK yang menerima KIP	7801	7851	7901	7951	8051	orang		
	9	Siswa SDTK, SMPTK, dan SMTK/SMAK yang menerima BOS	9054	9354	9554	9954	10454	orang		
	10	Mahasiswa Penerima BIDIKMISI	1118	1218	1318	1418	1818	orang		
	11	Mahasiswa Penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)	1150	1200	1241	1291	1491	orang		
	5	Meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan	1	Rerata nilai ujian sekolah SDTK	70	70	70	70	70	Nilai

2	Rerata nilai ujian sekolah SMPTK	70	70	70	70	70	Nilai
3	Rerata nilai ujian sekolah SMTK	65	65	65	65	65	Nilai
4	Indeks Integritas Siswa	65	65	65	65	65	%
5	Institusi PTK yang Terakreditasi Minimal B	7	7	7	7	7	Institusi
6	Prodi PTK yang Terakreditasi Minimal B	13	13	13	13	13	Unit
7	Peningkatan Kualifikasi Dosen PTK Kristen S3	30	30	30	30	30	Orang
8	Dosen Bersertifikat	100	100	100	100	100	Orang

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET KINERJA

Tujuan strategis yang telah ditetapkan Ditjen Bimas Kristen perlu dilakukan pengukuran. Untuk melakukan pengukuran sudah sampai sejauh mana Ditjen Bimas Kristen telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, maka ditetapkan sasaran strategis dan setiap sasaran strategis ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun 2019.

Adapun Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Akhir Tahun 2019 sebagai berikut ini.

**TARGET KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
AKHIR TAHUN 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
a	B	C		D	e
1	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Umat Beragama	-	Indeks Keshalihan Sosial	67	%
2	Meningkatnya Kualitas pelayanan Kegamaan	-	Indeks layanan keagamaan Kristen	75	%
3	Terselenggaranya tatakelola pemerintahan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel	1	Nilai Reformasi Birokrasi	82	Nilai
		2	Predikat Akuntabilitas Kinerja	A	-
4	Meningkatnya akses layanan pendidikan	1	APK SDTK	0,12	%

2	APK SMPTK	0,18	%
3	APK SMTK	0,80	%
4	APM SDTK	0,10	%
5	APM SMPTK	0,16	%
6	APM SMTK	0,75	%
7	APK PTKK	0,16	%
8	Siswa SDTK/SMPTK/SMTK yang menerima KIP	8051	orang
9	Siswa SDTK, SMPTK, dan SMTK/SMAK yang menerima BOS	10454	orang
10	Mahasiswa Penerima BIDIKMISI	1818	orang
11	Mahasiswa Penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)	1491	orang

5	Meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan	1	Rerata nilai ujian sekolah SDTK	70	Nilai
		2	Rerata nilai ujian sekolah SMPTK	70	Nilai
		3	Rerata nilai ujian sekolah SMTK	67	Nilai
		4	Indeks Integritas Siswa	67	%
		5	Institusi PTK yang Terakreditasi Minimal B	10	Institusi
		6	Prodi PTK yang Terakreditasi Minimal B	15	Unit
		7	Peningkatan Kualifikasi Dosen PTK Kristen S3	30	Orang
		8	Dosen Bersertifikat	100	Orang

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Bimas Kristen

1. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan untuk memperkuat peran dan fungsi agama sebagai landasan spiritual, moral, dan etik bagi pembangunan melalui :
 - a. Peningkatan kapasitas dan kualitas penyuluh agama dan tokoh agama Kristen, lembaga sosial keagamaan Kristen dan media massa dalam melakukan bimbingan keagamaan Kristen kepada umat;
 - b. Peningkatan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan umat Kristen

2. Meningkatkan bimbingan masyarakat Kristen, yang dilakukan melalui, antara lain:
 - a. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan informasi keagamaan, bimbingan keagamaan, dan sumber-sumber belajar keagamaan umat;
 - b. Peningkatan akses masyarakat terhadap kitab suci dan rumah ibadat;
 - c. Peningkatan kualitas dan kapasitas layanan penerangan agama Kristen melalui penyuluh agama untuk meningkatkan kualitas pemahaman ajaran Kristen;
 - d. Penguatan sistem pengawasan terhadap pesan-pesan keagamaan di berbagai media cetak, internet, dan media sosial lainnya;
 - e. Peningkatan kapasitas dan partisipasi lembaga sosial keagamaan dalam pembinaan umat;
 - f. Peningkatan kualitas dan kapasitas pembinaan, pemberdayaan, dan pengelolaan dana sosial keagamaan;
 - g. Peningkatan kualitas dan kapasitas layanan pendidikan agama dan keagamaan Kristen.

3. Meningkatkan kerukunan umat beragama dan layanan umat, yang dilakukan melalui, antara lain:
 - a. Pemberdayaan masyarakat, organisasi sosial keagamaan, serta pemuka agama agar secara mandiri dapat mencegah dan menyelesaikan konflik;
 - b. Peningkatan harmonisasi kehidupan sosial keagamaan terutama di daerah yang memiliki potensi konflik, pembentukan tim dalam penanganan konflik berbasis keagamaan;
 - c. Peningkatan pemahaman agama berwawasan multikultur;
 - d. Sosialisasi dan implementasi peraturan perundang-undangan mengenai kerukunan umat beragama.

4. Meningkatkan pendidikan Kristen, yang dilakukan melalui, antara lain:
 - a. Pengembangan kualitas dan kapasitas layanan kependidikan untuk memenuhi Standar Pendidikan Nasional (SNP);
 - b. Peningkatan akses, mutu, dan relevansi pendidikan keagamaan tingkat dasar, pendidikan keagamaan tingkat menengah, dan perguruan tinggi agama (PTA);
 - c. Peningkatan profesionalisme guru, dosen, dan tenaga kependidikan lainnya melalui pengembangan kualifikasi akademik, dan sertifikasi.
 - d. Peningkatan sistem rekrutmen guru, dosen, dan tenaga akademik lainnya, serta penataan distribusi secara proporsional dan merata.
 - e. Peningkatan kualitas layanan pendidikan agama Kristen melalui pengembangan kapasitas guru, pembenahan kurikulum dan metodologi, dan pengembangan sarana prasarana pembelajaran.
 - f. Peningkatan kualitas pembinaan dan fasilitasi pendidikan keagamaan nonformal melalui pengembangan kapasitas lembaga, bantuan operasional kependidikan, dan penyediaan sarana prasarana.
 - g. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan, serta pengawasan secara mandiri.

5. Meningkatkan dukungan manajemen dan kapasitas sarana prasarana, yang dilakukan melalui, antara lain:
 - a. Peningkatan kualitas dan kapasitas layanan perencanaan;
 - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas layanan kepegawaian;
 - c. Peningkatan kualitas dan kapasitas layanan keuangan;
 - d. Peningkatan kualitas dan kapasitas layanan organisasi dan tata laksana;

B. Kerangka Regulasi

Pembangunan bidang agama mencakup dimensi yang luas dan permasalahan yang kompleks. Luasnya dimensi pembangunan bidang agama tergambar dari cakupan bidang yang sangat luas meliputi: 1) kehidupan beragama yang terdiri dari pemahaman dan pengamalan ajaran agama, pelayanan keagamaan, pemberdayaan lembaga sosial keagamaan; 2) Kerukunan intern dan antar umat beragama; 3) Pendidikan agama dan keagamaan; 4) Tata kelola pembangunan bidang agama.

Berbagai kondisi dan permasalahan sebagaimana disebutkan pada Bab I Renstra ini membutuhkan sejumlah kerangka regulasi untuk pemecahannya. Hal ini dimaksudkan agar usaha mengatasi berbagai permasalahan dapat dilakukan secara lebih sistematis, terarah, efektif dan akuntabel. Kerangka regulasi sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karena itu, Ditjen Bimas Kristen berupaya untuk menggarap berbagai regulasi dan petunjuk teknis baik di bidang pelayanan keagamaan dan pendidikan keagamaan.

C. Kerangka Kelembagaan

1. Penataan Struktur dan Tata Kerja Organisasi

Penataan struktur dan tata kerja organisasi sangat penting dilakukan mengingat struktur organisasi Ditjen Bimas Kristen yang ada saat ini dari pusat sampai ke daerah belum mendukung dalam memberikan pelayanan kepada umat. Kondisi ini harus disiasati dengan penataan struktur dan tata kerja yang lebih efektif, efisien dan profesional. Untuk mendorong usaha tersebut prinsip yang dikembangkan dalam penataan organisasi adalah modernisasi, penggabungan, penajaman fungsi, dan penyusunan jabatan fungsional baru yang diperlukan. Penataan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dan analisis terhadap organisasi dan tata kerja Ditjen Bimas Kristen.

Berdasarkan PMA. Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, Struktur organisasi Ditjen Bimas Kristen belum diakomodasikan sesuai dengan kebutuhan baik pada di tingkat Pusat maupun di tingkat daerah. Perubahan tersebut perlu dilakukan dan diikuti pula dengan penataan organisasi instansi vertikal di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penataan struktur instansi vertikal ini akan merujuk pada organisasi tingkat pusat yang baru dan menyesuaikan pula dengan restrukturisasi program dan kegiatan di bidang anggaran. Penataan organisasi di setiap unit organisasi/kerjamemperhatikan hasil analisis organisasi dan beban kerja berdasarkan

prinsip-prinsip organisasi, karakteristik hubungan dan/atau pelayanan pemerintah suatu agama, jumlah penduduk dan pemeluk agama, luas wilayah dan kondisi geografis, peraturan perundang-undangan yang mendukung, jumlah lembaga keagamaan yang dibina, serta keberadaan dan jumlah jabatan fungsional.

2. Penataan Program dan Kegiatan

Restrukturisasi program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Agama sudah dimulai sejak tahun 2011 sebagai implementasi kebijakan anggaran berbasis kinerja (*Performance-Based Budgeting*) dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Melalui kebijakan restrukturisasi tersebut telah ditetapkan bahwa pimpinan unit eselon I sebagai penanggungjawab program atau *outcomes* dan pimpinan unit eselon II sebagai penanggungjawab kegiatan atau *outputs*.

Penyempurnaan restrukturisasi program dan kegiatan tampaknya masih diperlukan seiring dengan penajaman isu-isu strategis pembangunan bidang agama dan prioritas pembangunan bidang agama.

3. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur

Penataan aparatur sangat penting dilakukan mengingat masih terjadinya ketimpangan distribusi yang berdampak terhadap ketidakserasian antara postur tugas dan fungsi organisasi dengan performa pegawai. Penataan itu sendiri bertujuan untuk mengidentifikasi dan merumuskan solusi yang diperlukan untuk mengatasi kelebihan/kekurangan pegawai. Karena itu, prinsip yang digunakan dalam penataan pegawai adalah diperolehnya jumlah pegawai yang sesuai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas (kompetensi) dengan menerapkan sistem pola karir yang jelas dan terukur, dan penempatan aparatur pada posisi yang tepat.

Dalam mewujudkan penataan aparatur, langkah yang ditempuh antara lain melalui pengembangan Assesment Center dengan tugas mengintegrasikan sistem aplikasi Assesment Center ke dalam Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG), akselerasi pelaksanaan Assesment Center unit eselon I yang mandiri, membuat sistem pengukuran *Assesment Center*, dan menerapkan hasil *Assesment Center* dalam pengembangan aparatur. Dari berbagai langkah tersebut diharapkan dapat menjadi solusi bagi masalah pemerataan pegawai, pengembangan karir dan penempatan pegawai yang pada akhirnya berimplikasi terhadap kinerja organisasi.

Selanjutnya, untuk mewujudkan performa pegawai yang memiliki Integritas, Profesional, Tanggungjawab, Inovasi, dan Keteladanan (IPTIK) ditempuh, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi pegawai struktural maupun fungsional, serta pengembangan program beasiswa S2 dan S3. Sinergi dengan itu, dikembangkan pula pembenahan sistem rekrutmen pegawai, reformasi manajemen kepegawaian, dan pengembangan konsep unified untuk mengatasi manajemen PNS di daerah.

4. Peningkatan Komunikasi Publik

Komunikasi publik menjadi bagian yang perlu menjadi perhatian utama. Posisi Ditjen Bimas Kristen tidak sekedar sebagai lembaga birokrasi yang menjalankan fungsi legislator, administrator, dan fasilitator pembangunan bidang agama, lebih dari itu merupakan institusi moral yang notebene menjadi barometer moralitas institusi yang lain. Sosok pegawai Ditjen Bimas Kristen juga dicitrakan sebagai pribadi yang religius, ahli di bidang agama, berwawasan luas, dan berintegritas tinggi. Ekspektasi dan idealisme masyarakat yang begitu tinggi terhadap institusi dan aparatur, di satu sisi menguntungkan, tetapi disisi lain dapat merugikan ketika terjadi perilaku negatif oknum di lembaga ini.

Penguatan citra lembaga melalui komunikasi publik yang baik menjadi salah satu solusinya. Masyarakat tidak hanya melulu dijejali informasi negatif dari media yang cenderung membidik berita dengan logika oplah, tetapi perlu ada keseimbangan informasi dari internal dengan mengedepankan aspek akuntabilitas, transparansi, kecepatan dan akurasi. Untuk usaha tersebut perlu dioptimalkan langkah-langkah pemanfaatan secara optimal berbagai saluran informasi dan komunikasi publik seperti: media cetak, mencakup liputan dan jumpa pers, kunjungan pers (*press tour*), pemasangan iklan layanan masyarakat, penerbitan berkala majalah kedinasan (Ikhlas Beramal), penerbitan kalender tahunan, media elektronik mencakup liputan dan jumpa pers, dialog (*talk show*) TV dan radio, iklan layanan masyarakat, siaran berita, dan internet (*website*).Sepadan dengan itu, perlu dikembangkan *Pinmas Display Information Sistem*, sebagai penyedia informasi Kementerian Agama yang disiarkan melalui TV media.

5. Penguatan Sistem Pengendalian Internal

Terbitnya Undang Undang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (UU-SPIP) mengharuskan setiap pimpinan lembaga menerapkan sistem kendali kerja secara mandiri pada instansi yang dipimpinnya. Penerapan SPIP ini di lingkungan Kementerian Agama akan semakin

diperkuat untuk memastikan setiap pengelolaan program/kegiatan dan anggaran berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak berhenti sampai di situ, penerapan SPIP akan dikembangkan lebih jauh tidak terbatas pengendalian proses yang berakhir pada tercapainya *output*, melainkan sampai tahap pengendalian *outcome*.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Program Bimbingan Masyarakat Kristen merupakan salah satu program dari 11 (sebelas) program Kementerian Agama. Berdasarkan kebijakan restrukturisasi program dan kegiatan, Ditjen Bimas Kristen melaksanakan satu program pembangunan bidang agama dengan 5 kegiatan, yaitu pertama, kegiatan pembinaan dan pengelolaan urusan agama Kristen, kedua, kegiatan pembinaan dan pengelolaan pendidikan Agama Kristen, ketiga, kegiatan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya, keempat, kegiatan penyelenggaraan administrasi pendidikan bimas Kristen, dan kelima, kegiatan peningkatan akses, mutu dan daya saing pendidikan tinggi.

Pada program dirancang target *output* dan *outcome* yang akan dicapai dalam rentang lima tahun dengan mempertimbangkan aspek kapasitas lembaga, kemampuan anggaran negara, kemungkinan ketercapaian, dan perbagai perubahan lingkungan strategis yang bisa saja terjadi. Target Kinerja Ditjen Bimas Kristen dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Meningkatnya kualitas tata kelola dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Untuk mencapai Indikator output tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan:

- 1) Pembinaan administrasi perencanaan dan sistem informasi;
- 2) Pembinaan administrasi keuangan;
- 3) Pembinaan administrasi ortala dan kepegawaian;
- 4) Pembinaan administrasi umum dan BMN;
- 5) Penyusunan naskah kebijakan dan tugas teknis lainnya.

2. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen

Pengelolaan dan pembinaan urusan Agama Kristen, dengan indikator output meningkatnya kualitas bimbingan. Untuk mencapai *output* tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan:

- a. Peningkatan bimbingan masyarakat Kristen yang ditandai dengan: Jumlah penyuluh yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan, jumlah lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan, jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan budaya keagamaan Kristen, dan jumlah NPSK (naskah, norma, standard, prosedur dan kriteria).
- b. Pembinaan Kerukunan Internal Umat Kristen yang ditandai dengan jumlah fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat beragama Kristen.

3. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen, dengan indikator output:

- a. Meningkatnya kualitas guru dan pengawas PAK pada sekolah umum. Untuk mencapai indikator output tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan: jumlah guru non PNS yang menerima tunjangan profesi, jumlah guru PAK non PNS yang menerima tunjangan fungsional, jumlah guru PAK non PNS yang menerima tunjangan khusus, jumlah guru PAK yang ditingkatkan kualifikasi S1, jumlah guru PAK yang ditingkatkan kinerjanya, jumlah guru PAK yang ditingkatkan kompetensinya, jumlah guru PAK yang bersertifikat, jumlah guru PAK yang mengikuti program PLPG/PPG dan pembinaan, jumlah pengawas PAK yang ditingkatkan kompetensinya dan jumlah pengawas PAK yang mengikuti program PLPG/PPG dan pembinaan.
- b. Meningkatnya kualitas guru dan tenaga kependidikan pada semua jenjang sekolah pendidikan keagamaan. Untuk mencapai indikator output tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan : Jumlah guru bidang studi dan kepala SDTK yang ditingkatkan kompetensinya, Jumlah guru bidang studi dan kepala SMPTK yang ditingkatkan kompetensinya, , Jumlah guru bidang studi dan kepala SMTK yang ditingkatkan kompetensinya, jumlah guru bidang studi yang menerima tunjangan profesi, jumlah guru bidang studi yang menerima tunjangan khusus, jumlah guru bidang studi yang menerima tunjangan fungsional, jumlah guru bidang studi yang mengikuti program PLPG/PPG dan

- pembinaan, jumlah tenaga administrasi dan pustakawan yang ditingkatkan kompetensinya dan jumlah tenaga administrasi dan pustakawan yang ditingkatkan fungsional.
- c. Meningkatnya akses Pendidikan Agama dan keagamaan Kristen. Untuk mencapai indikator output tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan: Jumlah siswa SDTK, SMPTK, dan SMTK yang dilayani, Jumlah siswa SDTK yang menerima KIP, Jumlah siswa SMPTK yang menerima KIP, Jumlah siswa SMTK yang menerima KIP, Jumlah siswa SDTK yang menerima BOS, Jumlah siswa SMPTK dan SMTK yang menerima BOS, Jumlah siswa SMTK yang menerima BOS.
 - d. Meningkatnya kualitas Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Kristen. Untuk mencapai indikator output tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan : Jumlah lembaga POKJAWAS yang ditingkatkan kapasitasnya, Jumlah KKG dan MGMP yang dibina dan dikembangkan, Jumlah dokumen pengembangan kurikulum SDTK, SMPTK, dan SMTK serta SMAK yang dipersiapkan, Jumlah Ruang Kelas Baru (RKB) SDTK, SMPTK, dan SMTK yang dibangun, Jumlah gedung SDTK, SMPTK dan SMTK yang direhab, Jumlah sekolah pendidikan keagamaan yang menerima bantuan sarana dan prasarana, Jumlah SDTK, SMPTK dan SMTK yang dipersiapkan akreditasinya, Jumlah siswa yang mengikuti Ujian Nasional (UN), Jumlah mahasiswa miskin penerima bantuan pendidikan, Jumlah Dosen Non PNS yang disertifikasi, Jumlah Dosen Non PNS yang ditingkatkan kompetensinya, Jumlah Dosen Non PNS yang menerima Tunjangan Profesi, Jumlah Dosen Non PNS yang berkualitas S2/S3, Jumlah Ruang Kelas Baru (RKB) PTT/AK yang dibangun, Jumlah gedung PTT/AK yang direhab, Jumlah PTT/AK yang menerima bantuan operasional, Jumlah sarana dan prasarana PTT/AK yang memenuhi standard, Jumlah PTT/AK yang terakreditasi minimal B, Jumlah Prodi PTT/AK yang terakreditasi minimal B, Kurikulum PTT/AK yang memenuhi standard, Jumlah PTT/AK yang dikembangkan dan bermutu, Jumlah penelitian dan pengembangan, Jumlah Naskah Norma, Standard, Prosedur, Kriteria dan Kurikulum.

4. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Kristen

Meningkatnya akses dan mutu pendidikan tinggi agama Kristen. Untuk mencapai indikator output tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan : Jumlah mahasiswa miskin penerima beasiswa BIDIK MISI, Jumlah mahasiswa berprestasi penerima beasiswa PPA, Jumlah mahasiswa yang melakukan pengabdian masyarakat, Jumlah Dosen yang berkualifikasi S2/S3, Jumlah Dosen yang bersertifikat, Jumlah Dosen yang meningkat kompetensinya, Jumlah Dosen yang menerima Tunjangan Profesi, Jumlah sarana dan prasarana Pendidikan Tinggi Agama Kristen

yang memenuhi Standard, Jumlah Ruang Kelas Baru (RKB) yang dibangun, Jumlah gedung PTA yang direhab, Jumlah PTA yang menerima BOPTN, Jumlah dokumen penelitian yang bermutu, Jumlah PTA yang alih status, Jumlah PTA yang dikembangkan dan bermutu.

5. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen

Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Kristen. Untuk mencapai indikator output tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan: Jumlah Dokumen Administrasi dan Manajemen Pendidikan Kristen.

6. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen. Untuk mencapai indikator output tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan: Jumlah Dokumen administrasi perencanaan, keuangan, umum dan ortala, kepegawaian yang disusun tepat waktu, Jumlah naskah kebijakan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya,

B. Kerangka Pendanaan

Penyelenggaraan Pembinaan agama dan pendidikan Kristen termasuk pendanaannya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pembinaan agama dan pendidikan Kristen.

1. Pendanaan dari Pemerintah Pusat

Alokasi pendanaan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019, pendanaan dalam rangka pelaksanaan Program Bimbingan Masyarakat Kristen 2015-2019 sebesar Rp.2.488.081.450.000,- bersumber dari APBN. Pendanaan tersebut bertujuan untuk membiayai program dan kegiatan Ditjen Bimas Kristen dan Bimas Kristen di daerah untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan selama periode 2015-2019.

Kerangka pendanaan yang diperlukan, sebagai berikut:

- a. Sumber dana program berasal dari APBN 2015-2019, terutama pendanaan yang berasal dari rupiah murni.
- b. Di luar APBN, dana juga bisa diperoleh melalui bantuan pihak swasta, kerjasama antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

2. Pendanaan dari Pemerintah Daerah

Kontribusi pemerintah daerah yang telah berjalan dan diharapkan akan terus berkelanjutan antara lain berupa bantuan untuk pemberangkatan tim Kontingen Pesparawi Daerah, dan pembangunan rumah ibadah. Namun dukungan anggaran untuk pembinaan agama dan pendidikan Kristen belumlah optimal karena tidak semua pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pembinaan agama dan pendidikan Kristen. Untuk STAKN dan sekarang menjadi IAKN Manado telah mendapat bantuan hibah dari pemerintah daerah setempat untuk membangun kampus program pasca sarjana. Sedang untuk kampus STAKN/IAKN yang lain belum mendapat bantuan hibah dari pemerintah daerah dimana STAKN/IAKN tersebut berada. Hal tersebut dapat terlihat pada pengembangan kampus STAKN/IAKN yang memerlukan perluasan lahan, namun tidak mendapat bantuan dari pemerintah daerah sehingga pemerintah pusat harus mengusahakan melalui APBN. Untuk mencapai tujuan dan sasaran program tahun 2015-2019, diperlukan ketersediaan dana secara memadai.

3. Pendanaan dari Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pembinaan agama Kristen sudah berlangsung baik dengan berdirinya lembaga-lembaga keagamaan dan pembangunan rumah ibadah yang anggarannya bersumber dari masyarakat. Demikian pula dengan lembaga pendidikan agama dan keagamaan sudah cukup baik partisipasi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembinaan agama dan penyelenggaraan pendidikan Kristen.

BAB V

PENUTUP

Rancangan Renstra Ditjen Bimas Kristen 2015-2019 merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Agama dan Nawacita Presiden, dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019. Tujuan dan sasaran pembangunan bidang Agama akan diwujudkan melalui pencapaian berbagai Indikator Kinerja Program (IKP). Disadari, untuk mencapai target tersebut bukan tugas ringan dan sederhana, untuk itu diperlukan komitmen dan kerja keras seluruh pimpinan dan staf Ditjen Bimas Kristen.

Dokumen rancangan Renstra Ditjen Bimas Kristen 2015-2019 ini, selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Bimas Kristen dalam menyusun rencana kerja selama lima tahun ke depan 2015-2019.

Jakarta, 20 Maret 2018
Direktur Jenderal,

THOMAS PENTURY

INDIKATOR KINERJA UTAMA DITJEN BIMAS KRISTEN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	VARIABEL/INDIKATOR	CARA PENGUKURAN INDIKATOR	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama Kristen	Indeks Keshalihan Sosial Umat Beragama Kristen	1. Pengetahuan 2. Sikap 3. Perilaku	Survei	Ditjen Bimas Kristen	Hasil Survei Badan Litbang dan Diklat
2	Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan Kristen	a. Indeks layanan keagamaan Kristen (jenis layanan khusus di masing-masing agama)	1. Sarana Prasarana Ibadah 2. Penyuluh Agama 3. Kitab Suci 4. Lembaga Sosial Keagamaan	Survei	Ditjen Bimas Kristen	Hasil Survei Badan Litbang dan Diklat
3	Meningkatnya akses layanan pendidikan Kristen	a. APK SDTK	1. Jumlah siswa SDTK 2. jumlah penduduk usia 7 s.d. 12	Jumlah siswa SDTK : Jumlah penduduk usia 7 s.d. 12 Tahun	Ditjen Bimas Kristen	Direktorat Pendidikan Agama Kristen

		b. APK SMPTK	1. Jumlah siswa SMPTK 2. jumlah penduduk usia 13 s.d. 15	Jumlah siswa SMPTK : Jumlah penduduk usia 13 s.d. 15 Tahun	Ditjen Bimas Kristen	Direktorat Pendidikan Agama Kristen
		c. APK SMTK	1. Jumlah siswa SMTK 2. jumlah penduduk usia 16 s.d. 18	Jumlah siswa SMTK : Jumlah penduduk usia 16 s.d. 18 Tahun	Ditjen Bimas Kristen	Direktorat Pendidikan Agama Kristen
		d. APM SDTK	1. Jumlah siswa SDTK yang berusia 7 s.d. 12 tahun 2. Jumlah Penduduk Usia 7 s.d. 12 tahun	Jumlah siswa SDTK yang berusia 7 s.d. 12 tahun : Jumlah Penduduk Usia 7 s.d. 12 tahun	Ditjen Bimas Kristen	Direktorat Pendidikan Agama Kristen
		f. APM SMPTK	1. Jumlah siswa SMPTK yang berusia 13 s.d. 15 tahun 2. Jumlah Penduduk Usia 13 s.d. 15 tahun	Jumlah siswa SMPTK yang berusia 13 s.d. 15 tahun : Jumlah Penduduk Usia 13 s.d. 15 tahun	Ditjen Bimas Kristen	Direktorat Pendidikan Agama Kristen

		g. APM SMTK	1. Jumlah siswa SMTK yang berusia 16 s.d. 18 tahun 2. Jumlah Penduduk Usia 16 s.d. 18 tahun	Jumlah siswa SMTK yang berusia 16 s.d. 18 tahun : Jumlah Penduduk Usia 16 s.d.18 tahun	Ditjen Bimas Kristen	Direktorat Pendidikan Agama Kristen
		h. APK PTK	1. Jumlah mahasiswa PTK 2. Jumlah penduduk usia 19 s.d. 23 tahun	Jumlah mahasiswa PTK : Jumlah penduduk usia 19 s.d. 23 Tahun	Ditjen Bimas Kristen	Direktorat Pendidikan Agama Kristen
4	Meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan Kristen	a. Rerata nilai ujian sekolah SDTK	1. Jumlah siswa yang mengikuti ujian SDTK 2. Jumlah nilai ujian SDTK	Jumlah nilai ujian SDTK : Jumlah siswa yang mengikuti ujian SDTK	Ditjen Bimas Kristen	Ditjen Bimas Kristen
		b. Rerata nilai ujian sekolah SMPTK	1. Jumlah siswa yang mengikuti ujian SMPTK 2. Jumlah nilai ujian SMPTK	Jumlah nilai ujian SMPTK : Jumlah siswa yang mengikuti ujian SMPTK	Ditjen Bimas Kristen	Ditjen Bimas Kristen
		c. Rerata nilai ujian sekolah SMTK/SMAK	1. Jumlah siswa yang mengikuti ujian SMTK/SMAK 2. Jumlah nilai ujian SMTK/SMAK	Jumlah nilai ujian SMTK/SMAK : Jumlah siswa yang mengikuti	Ditjen Bimas Kristen	Ditjen Bimas Kristen

				ujian SMTK/SMAK		
		d. Indeks Integritas Siswa	1. Kejujuran 2. Dapat Dipercaya 3. Tanggungjawab 4. Keadilan 5. Menjaga Kehormatan	1. Pengukuran Pengetahuan (Gutman skala 0-1) 2. Sikap Thurstone skala 1-10) 3. Tindakan (Likert skala 1-4)	Ditjen Bimas Kristen	Direktorat Pendidikan Agama Kristen
		e. Institusi PTK Kristen yang Terakreditasi Minimal B	Jumlah PTK Kristen yang terakreditasi Minimal B	Penilaian Akreditasi BAN PT	Ditjen Bimas Kristen	BAN PT
		f. Prodi PTK yang Terakreditasi Minimal B	Jumlah Prodi PTK Kristen yang terakreditasi Minimal B	Penilaian Akreditasi BAN PT	Ditjen Bimas Kristen	BAN PT
		g. Kualifikasi Dosen PTK Kristen S3 Luar Negeri	Jumlah Dosen PTK Kristen yang mengikuti Peningkatan Kualifikasi S3 Luar Negeri (LN)	Jumlah Dosen yang mengikuti Program S3 LN	Ditjen Bimas Kristen	Ditjen Bimas Kristen
		h. Dosen Bersertifikat	Jumlah Dosen PTK Kristen yang disertifikasi	Jumlah Dosen yang memiliki NIDN	Ditjen Bimas Kristen	Ditjen Bimas Kristen

INDIKATOR KINERJA UTAMA									
DIREKTORAT PENDIDIKAN KRISTEN									
ESELON II PENDIDIKAN		ESELON III PENDIDIKAN			ESELON IV PENDIDIKAN			SEKSI	
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kasi/kasubag	
Meningkatnya mutu pendidikan dan pembelajaran pendidikan keagamaan	Pengembangan Mutu Pendidikan dan Pembelajaran	Terkoordinasikannya pengembangan perangkat Kurikulum dan evaluasi Pendidikan Tk. Dasar	Persentase dokumen Perangkat Kurikulum dan evaluasi Pendidikan Tk. Dasar	Tersusunnya Perangkat Kurikulum Pada Pendidikan Tk. Dasar	Jumlah Dokumen Perangkat Kurikulum dan evaluasi	Seksi Kurikulum dan Evaluasi Pendidikan Dasar			
				Tersusunnya Perangkat evaluasi Pada Pendidikan Tk. Dasar	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Ujian Nasional/ Mata Pelajaran Adaptif				
				Tersusunnya Perangkat pelaksanaan ujian Pada Pendidikan Tk. Dasar	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Ujian Sekolah berbasis Daerah				
				Tersusunnya Perangkat pengembangan kurikulum Pada Pendidikan Tk. Dasar	Jumlah Dokumen Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tk. Dasar				
				Tersusunnya Perangkat evaluasi	Jumlah Dokumen Evaluasi				

						kurikulum Pada Pendidikan Tk. Dasar	Kurikulum dan Evaluasi Pendidikan Tk. Dasar	
						Tersusunnya Perangkat regulasi kurikulum Pada Pendidikan Tk. Dasar	Jumlah Dokumen Regulasi Kurikulum dan Evaluasi Pendidikan Tk. Dasar	
	Meningkatnya Kualitas Lembaga Pendidikan Tk. Dasar	Peningkatan Kualitas Lembaga Pendidikan Tk. Dasar	Terealisasi pemberian ijin penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Tk. Dasar	Persentase Lembaga Pendidikan Tk. Dasar yang diberikan Ijin Penyelenggaraan		Tersusunnya Perangkat Pendirian Lembaga Pendidikan Pada Pendidikan Tk. Dasar	Jumlah Dokumen Perangkat Pendirian Lembaga Pendidikan	Seksi Kelembagaan Pendidikan Dasar
						Tersusunnya Perangkat Sarana dan Prasarana Sekolah	Jumlah Dokumen Perangkat Sarana dan Prasarana Sekolah	
						Tersusunnya Perangkat Regulasi Pendidikan Tk. Dasar	Jumlah Dokumen Regulasi Pendidikan Tk. Dasar	
						Tersusunnya Perangkat Evaluasi Lembaga Pendidikan Tk. Dasar	Jumlah Dokumen Evaluasi Lembaga Pendidikan Tk. Dasar	
	Meningkatnya Kualitas Tenaga	Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik,	Terealisasi Tenaga Pendidik,	Persentase Tenaga Pendidik,		Tersusunnya Ketenagaan Pendidikan Tk. Dasar	Jumlah Dokumen Ketenagaan Pendidikan Tk. Dasar	Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan

	Pendidik, Kependidikan dan siswa Tk. Dasar	Kependidikan dan siswa Tk. Dasar	Kependidikan dan siswa Tk. Dasar yang berkarakter	Kependidikan dan siswa Tk. Dasar yang berkarakter	Tersusunnya Kesiswaan Pendidikan Tk. Dasar	Jumlah Dokumen Kesiswaan Pendidikan Tk. Dasar	Pendidikan Dasar
					Tersusunnya Perangkat Regulasi Pendidikan Tk. Dasar	Jumlah Dokumen Regulasi Pendidikan Tk. Dasar	
					Tersusunnya Perangkat Evaluasi Ketenagaan Pendidikan Tk. Dasar	Jumlah Dokumen Evaluasi Ketenagaan Pendidikan Tk. Dasar	
					Tersedianya data Siswa Miskin yang menerima Program Indonesia Pintar Pendidikan Tk. Dasar	Jumlah Siswa Miskin yang menerima Program Indonesia Pintar Pendidikan Tk. Dasar	
Meningkatnya mutu Pendidikan Agama Kristen pada sekolah umum dan pendidikan keagamaan Kristen Tk.	Pengembangan Mutu Pendidikan Agama Kristen pada sekolah umum dan pendidikan keagamaan Kristen Tk. Menengah		Terkoordinasi pengembangan Perangkat Kurikulum dan evaluasi Pendidikan Tk. Menengah.	Persentase dokumen Perangkat Kurikulum dan evaluasi Pendidikan Tk. Menengah.	Tersusunnya Perangkat Kurikulum PAK pada Sekolah Umum dan Pendidikan Keagamaan Kristen Tk. Menengah.	Jumlah Dokumen Perangkat Kurikulum.	Seksi Kurikulum dan Evaluasi Pendidikan Tk. Menengah.
					Tersusunnya Perangkat evaluasi PAK pada Sekolah Umum Tk. Menengah.	Jumlah Dokumen Evaluasi PAK pada Sekolah Umum Tk. Menengah.	

	Menengah					Tersusunnya Perangkat evaluasi Pendidikan dan Pembelajaran Keagamaan Kristen Tk. Menengah.	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Keagamaan Tk. Menengah	
						Tersusunnya Perangkat pengembangan kurikulum PAK Tk. Menengah pada Sekolah Umum	Jumlah Dokumen Pengembangan Kurikulum PAK Tk. Menengah pada Sekolah Umum	
						Tersusunnya Perangkat evaluasi kurikulum Pada Pendidikan Keagamaan Tk. Menengah.	Jumlah Dokumen Evaluasi Kurikulum Pendidikan Keagamaan Tk. Menengah.	
	Meningkatnya Kualitas Lembaga Pendidikan Tk. Menengah.	Peningkatan Kualitas Lembaga Pendidikan Tk. Menengah.	Terealisasi pemberian ijin penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Tk. Menengah.	Persentase Lembaga Pendidikan Tk. Menengah yang diberikan Ijin Penyelenggaraan		Tersusunnya Perangkat Pendirian Lembaga Pendidikan Pada Pendidikan Tk. Menengah.	Jumlah Dokumen Perangkat Pendirian Lembaga Pendidikan	Seksi Kelembagaan Pendidikan Tk. Menengah.
						Tersusunnya Perangkat Sarana dan Prasarana Sekolah	Jumlah Dokumen Perangkat Sarana dan Prasarana Sekolah	

						Tersusunnya Perangkat Regulasi Pendidikan Tk. Menengah.	Jumlah Dokumen Regulasi Pendidikan Tk. Menengah.	
						Tersusunnya Perangkat Evaluasi Lembaga Pendidikan Tk. Menengah.	Jumlah Dokumen Evaluasi Lembaga Pendidikan Tk. Menengah.	
	Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik, Kependidikan dan Tk. Menengah yang berkarakter.	Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik, Kependidikan dan siswa Tk. Menengah.	Terealisasiannyanya Tenaga Pendidik, Kependidikan dan siswa Tk. Menengah yang berkarakter	1. Persentase Tenaga Pendidik, Kependidikan dan siswa Tk. Menengah yang berkarakter		Tersusunnya Ketenagaan Pendidikan Tk. Menengah.	Jumlah Dokumen Ketenagaan Pendidikan Tk. Menengah.	Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan Pendidikan Tk. Menengah.
					Tersusunnya Kesiswaan Pendidikan Tk. Menengah.	Jumlah Dokumen Kesiswaan Pendidikan Tk. Menengah.		
					Tersusunnya Perangkat Regulasi Pendidikan Tk. Menengah.	Jumlah Dokumen Regulasi Pendidikan Tk. Menengah.		
					Tersusunnya Perangkat Evaluasi Ketenagaan Pendidikan Tk. Menengah.	Jumlah Dokumen Evaluasi Ketenagaan Pendidikan Tk. Menengah.		

						Tersedianya data Siswa Miskin yang menerima Program Indonesia Pintar Pendidikan Tk. Menengah.	Jumlah Siswa Miskin yang menerima Program Indonesia Pintar Pendidikan Tk. Menengah.	
Meningkatnya mutu pendidikan dan pembelajaran pendidikan keagamaan	Peningkatan mutu Akademik dan Akreditasi Perguruan Tinggi Agama Kristen Swasta/ Negeri	Terealisasi Pengembangan Akademik dan Akreditasi Perguruan Tinggi Agama Kristen Swasta/ Negeri	Pentase Pengembangan Akademik dan Akreditasi Perguruan Tinggi Agama Kristen Swasta/ Negeri	Tersedianya data Perguruan Tinggi Agama Kristen Negeri/Swasta yang belum mendapat Akreditasi pada BAN PT	Jumlah Dokumen Pengembangan Akademik Perguruan Tinggi Agama Kristen Negeri dan Swasta	Seksi Pengembangan Akademik dan Akreditasi		
				Tersedianya data Akreditasi BAN PT pada Perguruan Tinggi Agama Kristen Negeri dan Swasta	Jumlah Dokumen Akreditasi Perguruan Tinggi Agama Kristen Negeri dan Swasta			
				Tersedianya Statuta Perguruan Tinggi Agama Kristen/ Negeri yang sudah ditandatangani oleh Dirjen Bimas Krsiten	Jumlah Dokumen Statuta Perguruan Tinggi Agama Kristen Negeri dan Swasta			

						Tersusunnya Perangkat Pengembangan Kurikulum pada Pendidikan Tinggi	Jumlah Dokumen Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi	
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Tinggi Agama Kristen	Peningkatan mutu kualitas Pendidikan Tinggi Agama Kristen		Terealisasi Pemberian Ijin Penyelenggaraan/Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Agama Kristen Swasta/Negeri	Persentase lembaga Perguruan Tinggi yang diberikan Ijin Penyelenggaraan/Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Agama Kristen Swasta/Negeri		Tersedianya perangkat pendirian Lembaga Perguruan Tinggi Agama Kristen Negeri/Swasta	Jumlah Dokumen Perangkat Pendirian Lembaga Perguruan Tinggi Agama Kristen/Swasta	Seksi Kelembagaan Pendidikan Tinggi
						Tersedianya data prodi Perguruan Tinggi Agama Kristen Negeri/Swasta	Jumlah Prodi yang sudah terakreditasi	
						Tersusunnya laporan Perguruan Tinggi Agama Kristen Negeri/Swasta	Jumlah Dokumen laporan Perguruan Tinggi Agama Kristen Negeri/Swasta	
						Tersusunnya perangkat Regulasi Pendidikan Tinggi	Jumlah Dokumen Regulasi Pendidikan Tinggi	
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Peningkatan Kualitas Pendidikan		Terealisasi Tenaga pendidik dan	Persentase Tenaga Pendidik dan		Tersusunnya Ketenagaan Pendidikan Tinggi	Jumlah Dokumen Ketenagaan Pendidikan Tinggi	Seksi Ketenagaan dan Kemahasiswaan

	Tinggi Agama Kristen	Tinggi Agama Kristen	Kependidikan PTAKN/S	Kependidikan PTAKN/PTAKS	Tersedianya data mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Kristen Negeri/Swasta	Jumlah Dokumen Mahasiswa PTAKN/PTAKS	Pddkn Tinggi
					Tersedianya Data Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap Perguruan Tinggi Agama Kristen Negeri/Swasta	Jumlah Dokumen Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap Perguruan Tinggi Agama Kristen Negeri/Swasta	
					Tersedianya data mahasiswa miskin penerima bantuan	Jumlah penerima bantuan untuk mahasiswa miskin	
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Agama Kristen	Peningkatan Program kerja dan rencana kerja Direktorat Pendidikan Kristen			Tersusunnya Program Kerja Direktorat Pendidikan Kristen	Tersusunnya Program Kerja Direktorat Pendidikan Kristen	Jumlah Dokumen Program Kerja	Kasubbag Tata Usaha
					Tersusunnya Program Kerja Direktorat Pendidikan Kristen	Jumlah Dokumen laporan tahunan pendidikan Kristen	
					Tersusunnya dokumen arsip aktif dan in aktif Direktorat Pendidikan Krsiten	Jumlah dokumen arsip aktif dan arsip in aktif Pendidikan Kristen	

						Terkoordinasik annya Dokumen Regulasi Pendidikan Kristen	Jumlah Dokumen Regulasi Pendidikan Kristen
						Terkoordinasik aanya Data Direktorat Pendidikan Kristen	Jumlah dokumen data Direktorat Pendidikan Kristen
						Terkoordinasik annya berkas kepegawaian Direktorat Pendidikan Kristen	Jumlah Dokumen kepegawaian Direktorat Pendidikan kristen

INDIKATOR KINERJA UTAMA												
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN												
No	Eselon II/ Sekretaris		Eselon III				Eselon IV			Subbag		
	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja				
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan, verifikasi keuangan dan pelaporan keuangan	1	Peningkatan Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntable	1	Terkoordinasinya penyiapan kelengkapan dokumen verifikasi	1	Presentase kelengkapan dokumen verifikasi	1	Tersedianya dokumen pengelolaan verifikasi keuangan	1	Jumlah dokumen laporan verifikasi (semester)	Subbag Verifikasi
								2	Jumlah dokumen verifikasi (semester, tahunan)			
								2	Tersedianya juknis verifikasi keuangan	1	Jumlah dokumen juknis verifikasi keuangan	
								3	Tersedianya dokumen pelaksanaan kegiatan	1	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan	
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan, verifikasi keuangan dan pelaporan keuangan	1	Peningkatan Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntable	2	Terkoordinasinya penyiapan kelengkapan dokumen Pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan	1	Presentase kelengkapan dokumen Pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan	1	Tersedianya Dokumen pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan	1	Jumlah dokumen realisasi anggaran (triwulan, semester, tahunan)	Subbag Pelaksana Anggaran dan Perbendaharaan
								2	Jumlah dokumen SPM, SP2D, SPP, SPTB (Triwulan, Semester, Tahunan)			

								3	Jumlah dokumen pengajuan UP, TUP dan LS	Subbag Pelaksana Anggaran dan Perbendaharaan
								4	Jumlah dokumen realisasi anggaran melalui SPAN (Triwulan, semester, tahunan)	
								5	Jumlah dokumen penyampaian pelaporan program/kegiatan melalui aplikasi Smart	
		3	Terkoordinasikannya penyiapan kelengkapan dokumen belanja pegawai	1	Presentase kelengkapan dokumen belanja pegawai	1	Tersedianya dokumen pengelolaan belanja pegawai	1	Jumlah dokumen gaji pegawai	
								2	Jumlah dokumen tunjangan kinerja pegawai	
								3	Jumlah dokumen SKPP	
								4	Jumlah dokumen perubahan gaji pegawai (per orang)	

								5	Jumlah dokumen pengelolaan uang makan pegawai	Subbag Pelaksana Anggaran dan Perbendaharaan									
	2	Peningkatan implementasi Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntable	1	Terkoordinasikannya penyiapan dokumen kebendaharaan	1	Presentase kelengkapan dokumen kebendaharaan	1	Tersedianya dokumen kebendaharaan	1		Jumlah dokumen Buku Kas Umum per bulan								
									2		Jumlah dokumen SSP, SSBP (semester)								
									3		Jumlah dokumen buku pembantu								
			2	Terkoordinasinya penyusunan juknis pelaksanaan Anggaran dan perbendaharaan	1	Presentase kelengkapan dokumen juknis pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan	1	Tersedianya juknis pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan	1		Jumlah dokumen juknis pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan								
												3	Terkoordinasikannya penyiapan penyusunan Laporan Kegiatan	1	Presentase kelengkapan dokumen laporan kegiatan	1	Tersedianya Laporan Pelaksanaan kegiatan	1	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan
																		2	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan RDK

			4	Terkoordinasikan ya penyiapan kelengkapan penyusunan Laporan Keuangan	1	Persentase menyiapkan dokumen dokumen Laporan keuangan	1	Tersedianya Laporan Keuangan	1	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Eselon I (Semester dan Tahunan)	Subbag Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
									2	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Satker pusat (Triwulan, Semester dan tahunan)	
									3	Jumlah dokumen laporan keuangan unaudited dan audited Eselon I dan satker pusat	
									4	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Wilayah (Semester dan Tahunan)	
							2	Tersedianya Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)	1	Jumlah dokumen Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) satker pusat dan daerah dengan KPPN per bulan	
									2	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Intern dengan BMN per bulan	
							3	Tersedianya dokumen Laporan BMN	1	Jumlah dokumen Laporan BMN	
							4	Tersedianya dokumen sumber Lap. Keuangan	1	Jumlah dokumen sumber semester I dan II	

							5	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi	1	Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan keuangan	Subbag Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	
							6	Tersedianya Laporan Kegiatan	1	Jumlah dokumen kegiatan Konsultasi Rekonsiliasi dan Verifikasi (keuangan dan pelaksanaan)		
			5	Terkoordinasikannya penyiapan penyusunan realisasi anggaran satker pusat per bulan	1	Tersedianya penyiapan dokumen realisasi anggaran satker pusat perkegiatan per bulan	1	Tersedianya realisasi anggaran satker pusat perkegiatan per bulan	1	Jumlah dokumen realisasi anggaran satker pusat perkegiatan perbulan		
2	Meningkatnya kualitas perencanaan, sistem informasi, evaluasi dan pelaporan efektif dan efisien	1	Persentase perencanaan Satker yang berbasis <i>Money Follow Program</i> (MFP)	1	Terkoordinasikannya semua perencanaan Satker yang berbasis <i>Money Follow Program</i>	1	Persentase Satker Yang lengkap menyiapkan dokumen kelengkapan perencanaan program dan kegiatan (dokumen program, kegiatan, data dukung)	1	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Satker Bimas Kristen	1	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Satker Bimas Kristen	Subbag Perencanaan

				2	Persentase dokumen Pagu Indikatif Rencana Kerja dan Anggaran Satker Bimas Kristen	1	Tersedianya dokumen Pagu Indikatif Rencana Kerja dan Anggaran Satker Bimas Kristen	1	Jumlah dokumen Pagu Indikatif Rencana Kerja dan Anggaran Satker Bimas Kristen		
				3	Persentase dokumen PAGU Anggaran RKAKL Satker Bimas Kristen	1	Tersedianya dokumen Pagu Anggaran RKA-K/L Satker Bimas Kristen	1	Jumlah dokumen Pagu Anggaran RKA-K/L Satker Bimas Kristen		
				4	Persentase dokumen PAGU Alokasi Anggaran Satker Bimas Kristen	1	Tersedianya dokumen Pagu Alokasi Anggaran RKA-K/L Satker Bimas Kristen	1	Jumlah dokumen Pagu Alokasi Anggaran RKA- K/L Satker Bimas Kristen	Subbag Perencanaan	
			2	Terkoordinasikannya Dokumen Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program rutin (triwulan/semestera	1	Persentase Dokumen Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program rutin (triwulan/semeste	1	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program rutin (triwulan /semesteran / tahunan)	1	Jumlah dokumen penyediaan pelaporan pelaksanaan program rutin (triwulan/semesteran/tahunan)	Subbag Evaluasi dan Pelaporan

				n/tahunan)		ran/tahunan)	2	Tersedianya Dokumen evaluasi pelaksanaan program rutin (triwulan/semesteran /tahunan) kepada Bappenas, Biro Perencanaan, Kemenkeu	1	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program rutin (triwulan/semesteran/tahunan) kepada Bappenas, Biro Perencanaan, Kemenkeu	
							3	Tersedianya Dokumen penyampaian pelaporan program/kegiatan melalui e-mpa	1	Jumlah dokumen penyampaian pelaporan program/kegiatan melalui e-mpa	
							4	Tersedianya Dokumen penyampaian pelaporan program/kegiatan melalui e-monev Bappenas	1	Jumlah dokumen penyampaian pelaporan program/kegiatan melalui e-monev Bappenas	
	2	Persentase perencanaan Satker yang berbasis Money Follow Program (MFP)	1	Terkoordinasikan layanan dan publikasi Ditjen Bimas Kristen.	1	Persentase layanan Ditjen Bimas Kristen melalui pameran , media cetak dan elektronik	1	Terpublikasikannya layanan Ditjen Bimas Kristen melalui pameran , media cetak dan elektronik	1	Jumlah dokumen data Ditjen Bimas Kristen per Tahun	Subbag Sistem Informasi
									2	Jumlah dokumentasi layanan yang dipublikasikan	
									3	Jumlah berita yang didokumentasikan	

								4	Jumlah berita yang dipublikasikan		
								5	Jumlah pameran yang di ikuti setiap tahun		
							2	Tersedianya sistem aplikasi yang terbaru	Jumlah pengembangan sistem aplikasi yang terbaru		
3	Meningkatnya Kualitas pelayanan teknis dan Administrasi di bidang Ketatausahaan, pengadaan Barang dan Jasa dan Kerumahan di lingkungan Ditjen Bimas Kristen	1	Peningkatan kualitas pendistribusian surat dan pelayanan Administrasi Ketatausahaan	1	Terkoordinasikannya Tata Kelola Kearsipan dan pengelolaan tata naskah dinas yang tertib dan benar	1	Persentase Laporan tata kelola Kearsipan	1	Tersedianya laporan tata kelola Kearsipan	Jumlah laporan tata kelola Kearsipan	Subag TU Bagian Umum
							2	Tersedianya dokumen pelayanan ketatausahaan	Jumlah Dokumen pelayanan Ketatausahaan yang tersedia		
		2	Kecepatan pelayanan administrasi ketatausahaan	1	Terkoordinasikannya sistem tata kelola pelayanan ketatausahaan yang efektif dan efisien	1	Persentase pengimplementasian Tata Naskah Dinas sesuai peraturan yang berlaku	1	Tersediannya laporan kegiatan Sosialisasi tentang Tata Naskah Dinas	Jumlah laporan kegiatan tentang Tata Naskah Dinas	
		3	Peningkatan kualitas pelayanan Tata Kelola	1	Terkoordinasikannya Pengelolaan Surat tugas yang tertib dan benar	1	Persentase dokumen surat tugas/perjalanan dinas	1	Tersedianya Dokumen surat tugas/ perjalanan dinas	Jumlah surat tugas/ perjalanan dinas yang terdokumentasikan	Subag Rumah Tangga

		Kerumahtanggaan	2	Terkoordinasikannya Pengelolaan dan Pengarsipan Perjalanan Dinas	1	Presentase laporan rekapan perjalanan dinas	1	Tersusunnya laporan Rekap perjalanan dinas	1	Jumlah laporan perjalanan dinas yang terekap
			3	Terkoordinasikannya Pengelolaan Tata Kelola Kebutuhan Rumah Tangga	1	Presentase dokumen kebutuhan pegawai	1	Tersusunnya daftar kebutuhan rumah tangga pegawai	1	Jumlah kebutuhan rumah tangga pegawai
			4	Terkoordinasikannya Administrasi laporan Perawatan Kendaraan Dinas roda 2 dan roda 4	1	Prentase laporan perawatan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4	1	Tersusunnya laporan perawatan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4	1	Jumlah laporan perawatan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4
			5	Terkoordinasikannya laporan kegiatan Tata Kelola Kerumahtangaan Ditjen Bimas Kristen dan Jajarannya	1	Presentase laporan kegiatan Tata Kelola Kerumahtangaan Ditjen Bimas Kristen dan Jajarannya	1	Tersedianya laporan kegiatan Tata Kelola Kerumahtangaan Ditjen Bimas Kristen dan Jajarannya	1	Jumlah laporan kegiatan Tata Kelola Kerumahtangaan di Ditjen Bimas Kristen

		4	Peningkatan kualitas Pelaksanaan dan Pelaporan BMN	1	Terkoordinasikannya laporan pengadaan, laporan persediaan, daftar inventarisir BMN, dan laporan penghapusan BMN	1	Persentase dokumen pengadaan, laporan BMN Satker dan Eselon I, Laporan Barang Persediaan, Dokumen Daftar Inventaris BMN.	1	Tersedianya Dokumen tentang Pengadaan, Dokumen Laporan BMN Satker dan Eselon I, Dokumen Laporan Barang Persediaan, Dokumen Daftar Inventaris, Dokumen Laporan Kegiatan Diklat Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, Dokumen Laporan Kegiatan Workshop Pengelolaan BMN dan Dokumen Penghapusan BMN	1	Jumlah Dokumen Pengadaan Ditjen Bimas Kristen	Subbag Perlengkapan dan BMN
				2	Terkoordinasikannya Dokumen Laporan BMN tingkat Satker yang akuntabel	1	Persentase dokumen laporan BMN tingkat satuan kerja yang akuntabel	1	Tersedianya dokumen laporan BMN tingkat satuan kerja yang akuntabel	1	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Negara Ditjen Bimas Kristen Tingkat Satker	
				3	Terkoordinasikannya Dokumen Laporan BMN Tingkat Eselon I	1	Persentase dokumen laporan BMN tingkat eselon I yang	1	Tersedianya dokumen laporan BMN tingkat eselon I yang akuntabel	1	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Negara Ditjen Bimas Kristen Tingkat Es. I	

				yang akuntabel		akuntabel					
			4	Terkoordinasikan ya Dokumen Laporan Barang Persediaan Diten Bimas Kristen	1	Persentase dokumen laporan barang persediaan Ditjen Bimas Kristen	1	Tersedianya dokumen laporan barang persediaan Ditjen Bimas Kristen	1	Jumlah Dokumen Laporan Barang Persediaan Ditjen Bimas Kristen	Subbag Perlengkapan dan BMN
			5	Terkoordinasikan ya Dokumen Daftar Inventaris BMN Ditjen Bimas Kristen	1	Persentase dokumen daftar inventaris BMN Ditjen Bimas Kristen	1	Tersedianya dokumen daftar inventaris BMN Ditjen Bimas Kristen	1	Jumlah Dokumen Daftar Inventaris BMN Ditjen Bimas Kristen	
			6	Terkoordinasikannya Laporan Kegiatan Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	1	Persentase Laporan Kegiatan Diklat Pengadaan Barang Jasa Pemerintah	1	Tersedianya Laporan Kegiatan Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	1	Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	
			7	Terkoordinasikannya Laporan Kegiatan Workshop Pengelolaan Barang Milik Negara	1	Persentase Laporan Kegiatan Workshop Pengelolaan BMN	1	Tersedianya Laporan Kegiatan Workshop Pengelolaan Barang Milik Negara	1	Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Workshop Pengelolaan Barang Milik Negara	

			8	Terkoordinasikannya Dokumen Penyelesaian Penghapusan Barang Milik Negara	1	Persentase Dokumen Penyelesaian Penghapusan Barang Milik Negara	1	Tersedianya Dokumen Penyelesaian Penghapusan Barang Milik Negara	1	Jumlah Dokumen Penyelesaian Penghapusan Barang Milik Negara		
6	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola kepegawaian	1	Rerata Kinerja Pegawai	1	Terkoordinasikannya sistem pembinaan pegawai yang efektif	1	Persentase pembinaan pegawai yang dilaksanakan tepat waktu	1	Tersusunnya dokumen pengelolaan pembinaan pegawai	1	Jumlah dokumen pembinaan peningkatan kompetensi pegawai	Kasubbag Kepegawaian
										2	Jumlah dokumen peningkatan kompetensi pegawai	
										3	Jumlah dokumen administrasi penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu (penyuluh, pengawas, dosen, guru agama)	
				2	Terkoordinasikannya sistem penilaian pegawai SKP yang tepat dan akurat	1	Persentase satuan kerja yang menyampaikan laporan penilaian pegawai tepat waktu	2	Tersedianya data SKP pegawai lengkap	1	Jumlah dokumen monitoring implementasi SKP pegawai	
										2	Jumlah dokumen evaluasi SKP pegawai	

			3	Terkoordinasikan pelayanan kepegawaian yang prima	1	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	3	Tersusunnya dokumen tindak lanjut pelayanan kepegawaian	1	Jumlah dokumen pelayanan kebutuhan pegawai yang ditindaklanjuti (KGB, KP, Mutasi/Rotasi, promosi dan pensiun, askes, taspem, BPJS, karpeg)		
			4	Terkoordinasikan penyelesaian uraian jabatan dan analisis beban kerja	1	Persentase penyelesaian uraian jabatan (pusat dan daerah)	4	Tersedianya data uraian analisis jabatan dan analisis beban kerja secara lengkap	1	Jumlah dokumen analisis jabatan jabatan	Kasubbag Organisasi dan tata laksana	
					2	Persentase penyelesaian analisis beban kerja semua satuan kerja (pusat & daerah)			2	Jumlah dokumen analisis beban kerja		
					3	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pembinaan implementasi analisis jabatan						
					4	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pembinaan implementasi analisis beban kerja						
7		1	Persentase implementasi update data	1	Terkoordinasikannya sistem update data kepegawaian yang	1	Persentase penyelesaian pemutakhiran	1	Tersedianya data kepegawaian valid, akurat dan lengkap	1	Jumlah dokumen workshop pemutakhiran data SIMPEG	Kasubbag Kepegawaian

			kepegawaian secara rutin		efektif		data pegawai tepat waktu		2	Jumlah dokumen monitoring pemutakhiran data pegawaian satuan kerja		
8		1	Persentase implementasi digitalisasi arsip/dokumen kepegawaian	1	Terkoordinasikannya sistem digitalisasi dokumen kepegawaian yang efektif	1	Persentase penyelesaian dokumen kepegawaian	1	Tersedianya dokumen digitalisasi kepegawaian	1	Jumlah dokumen workshop digitalisasi data kepegawaian	
										2	Jumlah dokumen monitoring digitalisasi data kepegawaian	
9	Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi	1	lalu implementasi SAKIP	1	Terkoordinasikannya rancangan Renstra tepat waktu	1	Persentase penyelesaian RENSTRA tepat waktu	1	Tersusunnya dokumen Renstra	1	Jumlah dokumen Renstra Ditjen Bimas Kristen	Kasubbag Perencanaan
							2			Nilai komponen perencanaan kinerja (penilaian itjen)	2	
					2	Terkoordinasikannya tata kelola implementasi SAKIP yang efektif	1	Persentase implementasi SAKIP internal	2	Tersusunnya laporan implementasi SAKIP	2	Jumlah dokumen uraian indikator kinerja Eselon I, II, III dan IV
3	Jumlah dokumen workshop implementasi SAKIP	4	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pembinaan implementasi SAKIP									

				2	Nilai komponen LAKIP (penilaian itjen)	3	Tersusunnya LAKIP Ditjen Bimas Kristendiklat tepat waktu	4	Jumlah dokumen pembuatan pelaporan kinerja (LAKIP)	
				3	Nilai komponen evaluasi kinerja (penilaian itjen)	4	Tersusunnya dokumen evaluasi internal	5	Jumlah dokumen pembuatan sistem evaluasi internal SAKIP	
				4	Nilai komponen pengukuran kinerja (penilaian itjen)	5	Tersusunnya dokumen pengukuran kinerja	6	Jumlah dokumen pengukuran kinerja SAKIP	
				5	Nilai komponen capaian kinerja (penilaian itjen)	6	Tersusunnya dokumen capaian kinerja	7	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja organisasi (pimpinan)	
								8	Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja pimpinan	
	1	Nilai PMPRB Mandiri	1	Terkoordinasikannya implementasi reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	1	Jumlah satuan kerja yang mengimplementasikan SOP sesuai dengan aturan	1	Tersusunnya dokumen implementasi SOP	1	Jumlah dokumen evaluasi SOP
					2	Jumlah satuan kerja yang	1	Tersusunnya dokumen implementasi reformasi birokrasi (pusat dan daerah)	2	Jumlah dokumen workshop implementasi reformasi birokrasi
									3	Jumlah dokumen sosialisasi implementasi reformasi birokrasi

								4	Jumlah dokumen monitoring reformasi birokrasi	
							2	Tersusunnya data dukung penilaian reformasi birokrasi	5	Jumlah dokumen evident/kelengkapan bukti implementasi reformasi birokrasi
									6	Jumlah dokumen sistem pengendalian intern
									7	Jumlah dokumen ZI (zona integritas)
	2	Nilai Audit Kinerja	1	Terkoordinasikan penyelesaian audit kinerja tepat waktu	1	Persentase jumlah tindak lanjut audit kinerja yang selesai ditindaklanjuti		Tersusunnya bahan tindak lanjut hasil audit kinerja	1	Jumlah dokumen penyelesaian tindak lanjut/rekomendasi audit kinerja
									2	Jumlah dokumen workshop audit kinerja
	3	Persentase penyelesaian rekomendasi TLHP (temuan itjen, BPKP dan BPK)	1	Terkoordinasikannya penyelesaian rekomendasi TLHP	1	Persentase hasil temuan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	1	Tersusunnya dokumen tindak lanjut hasil audit	1	Jumlah dokumen pendampingan tindak lanjut hasil temuan
									2	Jumlah dokumen workshop penyelesaian temuan
	4	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Terkoordinasikan tindak lanjut pengaduan masyarakat tepat waktu	1	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti tepat waktu	1	Tersusunnya dokumen tindak lanjut pengaduan masyarakat	1	Jumlah dokumen workshop tindak lanjut pengaduan masyarakat
									2	Jumlah dokumen pembentukan sistem pengaduan masyarakat

									(SOP)			
								2	Jumlah dokumen hasil tindak lanjut pengaduan masyarakat			
		5	Jumlah regulasi Ditjen Bimas Kristendiklat yang ditelaah tingkat efektifitas dan implementasinya	1	Terkoordinasikannya sistem pengelolaan regulasi yang efektif	1	Persentase regulasi yang diterbitkan tepat waktu sesuai permohonan	1	Tersusunnya regulasi yang tepat dan akurat	1	Jumlah dokumen regulasi yang ditindaklanjuti untuk diterbitkan	Kasubbag Hukum dan Perundang-undangan
										2	Jumlah dokumen sosialisasi perundang-undangan	
						2	Persentase regulasi yang selesai dievaluasi tingkat efektifitas implementasinya			3	Jumlah dokumen regulasi yang dievaluasi	